



**PEMERINTAH
KABUPATEN
JEMBER**

RENCANA STRATEGIS RENSTRA BPKAD TAHUN 2025–2029

**Jalan Ahmad Yani No. 2, Jember Lor,
Patrang, Jember, Jawa Timur 68118**

Telp. 0331 – 4918041

Pos-el : bpkad@jemberkab.go.id





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	11
2.1.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	48
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	58
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	58
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	60
2.2.2 Isu Strategis.....	70
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	73
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	73
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	77
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	64
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja Indikator, Target	



	dan Pagu Indikatif	78
4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	92
4.3	Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	106
4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	111
BAB V PENUTUP.....		113

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 berdasarkan Eselon	16
Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 berdasarkan Golongan Ruang	16
Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 berdasarkan Pendidikan	17
Tabel 2.4 Jumlah Aset yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025	18
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (T-C.23)	49
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (T-C.24).....	56
Tabel 2.7 Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember	59
Tabel 2.8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Terhadap Visi dan Misi Kabupaten Jember	64
Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	66
Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi Jawa Timur	68
Tabel 2.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ditinjau Dari Implikasi RTRW	69
Tabel 2.12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ditinjau Dari Implikasi KLHS	70
Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	71
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	74
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (T.C.26)	77
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember	79



Tabel 4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan dan Pendanaan	93
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	107
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	111
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	112

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Pokok Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029	63
Gambar 2.2 Misi Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Jember Tahun 2025-2029	63
Gambar 3.1 Cascading Misi 3 RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029	75
Gambar 3.2 Cascading Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten



Jember berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Keuangan.

Dalam menyusun Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah hingga Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kabupaten/Kota dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember harus menyesuaikan nomenklatur indikator Subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Hal tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5); dan
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 1).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan Program dan Kegiatan tahunan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Perangkat Daerah

Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung Jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar hukum penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember paling sedikit memuat:
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;

- 2.1.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember paling sedikit memuat:
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; dan
 - 2.2.2 Isu strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini memuat.

- 3.1 Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;
- 3.2 Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;
- 3.3 Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; dan
- 3.4 Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini memuat:

- 1. Uraian Program;
- 2. Uraian Kegiatan;
- 3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif;
- 4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- 5. Target keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).



BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah..

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH****2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi:

**2.1.1 Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jember**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang keuangan. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Sekretariat

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Badan;



- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Badan;
 - c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di Lingkungan Badan;
 - d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan; dan
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- b. Bidang Anggaran
- 1. Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan anggaran belanja dan pembiayaan daerah, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
 - 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan APBD;
 - b. perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - c. pengkajian peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang anggaran;
 - d. menyiapkan pembinaan, petunjuk teknis dan bahan-bahan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
 - e. menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD;
 - f. penyusunan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - g. pengkoordinasian penyusunan APBD dan perubahannya serta penjabaran APBD dan perubahannya;
 - h. pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan verifikasi dokumen rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahannya;
 - i. penyelesaian temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
 - j. penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang teknis penyusunan anggaran Perangkat Daerah; dan



- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- c. Bidang Perbendaharaan
 - 1. Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan pedoman teknis, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan bidang penerimaan dan pengeluaran kas serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
 - 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
 - b. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - c. pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - d. pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian SP2D;
 - e. pelaksanaan verifikasi dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Operasional dan Belanja Non Operasional;
 - f. pelaksanaan verifikasi dan menyiapkan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
 - g. pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - h. pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran PFK;
 - i. penatausahaan utang, piutang daerah dan Tuntutan Perbendaharaan (TP);
 - j. pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
 - k. pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
 - l. penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - m. pelaksanaan pemrosesan usulan penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - n. penyelesaian temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
 - o. verifikasi dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji;
 - p. menyiapkan Anggaran Kas;

- q. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); dan
- r. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- d. Bidang Akuntansi
 1. Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, operasional, perencanaan dan pengendalian bidang akuntansi dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.
 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
 - a. pemrosesan akuntansi keuangan daerah sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis akuntansi pendapatan dan belanja;
 - c. penghimpunan, pengklasifikasian serta pengolahan laporan akuntansi pendapatan dan belanja daerah;
 - d. penelitian dan penganalisaan laporan akuntansi pendapatan dan belanja SKPD;
 - e. penyusunan laporan utang, piutang daerah dan pelaporan PFK;
 - f. penyelesaian temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
 - g. koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah;
 - h. koordinasi dan penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah;
 - i. pelaksanaan penatausahaan utang dan piutang daerah dan TP;
 - j. koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - k. rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan pendapatan LO dan Beban; dan
 - l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- e. Bidang Aset
 1. Bidang Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah serta melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Aset mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah serta petunjuk pelaksanaannya;
 - b. Pelaksanaan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik daerah Perangkat Daerah dan BLUD;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi barang milik daerah;
 - d. Pelaksanaan pelaporan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

Sumber daya merupakan salah satu instrumen yang sangat penting sebagai penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Sumber daya juga menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, dimana dengan sumber daya yang baik pelaksanaan tugas akan dapat terselesaikan dengan baik, tepat, cepat dan akurat. Berikut sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025

a. Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Aparatur Sipil Negara merupakan sumber daya manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, dengan kata lain Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu Aparatur Sipil Negara dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut Komposisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember berdasarkan Kategorinya:

Tabel 2.1

**Komposisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2025 Berdasarkan Eselon**

No	ESELON	JUMLAH
1	Eselon II/b	1
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	4
4	Eselon IV/a	7
JUMLAH		13

Sumber Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025

Berdasarkan Tabel Komposisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 berdasarkan Eselon di atas dapat disampaikan bahwa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember terdapat 1 (satu) orang Eselon II/b, 1 (satu) orang III/a, 4 (empat) orang Eselon III/b, 7 (tujuh) orang Eselon IV/a.

Tabel 2.2

**Komposisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.
Jember Tahun 2025 Berdasarkan Golongan Ruang**

NO	Gol/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/c	1	0	1
2	Golongan IV/b	1	0	1
3	Golongan IV/a	0	1	1
4	Golongan III/d	3	9	12
5	Golongan III/c	1	3	4
6	Golongan III/b	3	3	6
7	Golongan III/a	3	8	11
8	Golongan II/d	0	2	2
9	Golongan II/c	0	0	0
10	Golongan II/b	0	0	0
11	Golongan II/a	1	0	1



NO	Gol/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
12	Golongan I/d	0	0	0
13	Golongan I/c	1	0	1
14	Golongan I/b	0	0	0
15	Golongan I/a	0	0	0
16	PPPK / IX	2	1	3
17	PPPK / V	4	1	5
18	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	23	2	25
Jumlah		43	30	73

Sumber Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025

Berdasarkan Tabel Komposisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 berdasarkan Golongan Ruang di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari : 1 (satu) orang Golongan IV/c, 1 (satu) orang Golongan IV/b, 1 (satu) orang Golongan IV/a, 12 (dua belas) orang Golongan III/d, 4 (empat) orang Golongan III/c, 6 (enam) orang Golongan III/b, 11 (sebelas) orang Golongan III/a, 2 (dua) orang Golongan II/d, 1 (satu) orang Golongan II/a, 1 (satu) orang Golongan I/c, 8 (delapan) orang PPPK dan terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu).

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Magister - S2	6	0	6
2	Sarjana - S1	28	19	47
3	Diploma III	3	1	4
4	SLTA - Sederajat	7	8	15
5	SLTP - Sederajat	1	0	1
6	SD - Sederajat	0	0	0
Jumlah		45	28	73

Sumber Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025

Berdasarkan Tabel Komposisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 berdasarkan Pendidikan di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari : 6 (enam) orang Lulusan Magister S-2, 47 (empat puluh tujuh) orang Lulusan Sarjana S-1, 4 (empat) orang lulusan Diploma III, 15 (lima belas) orang lulusan SLTA, 1 (satu) orang lulusan SLTP.

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sumber daya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian Tugas Pokok dan Fungsi Instansinya. Adapun data sarana dan prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 berdasar jenisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Aset yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2025
KIB A (TANAH)

No	Nama Barang	Luas M2	Letak (Lokasi) Alamat	Status Tanah	Penggunaan
1	Tanah G. Tempat Tinggal Lain-Lain	595	Kelurahan Sempusari	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 4622
2	Tanah G. Tempat Tinggal Lain-Lain	1515	Kelurahan Sempusari	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 2388
3	Tanah Untuk Jalan Nasional	1600	Kelurahan Langkap	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 4015
4	Tanah Usaha	2000	Kelurahan Pecoro	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 2474
5	Tanah Usaha	2400	Kelurahan Glagahwero	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 3076
6	Tanah Usaha	7000	Kelurahan Arjasa	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 2885 (RTH ARJASA)
7	Tanah Usaha	3000	Kelurahan Tanggul	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 4542
8	Tanah Untuk Jalan Nasional	3290	Kelurahan Candijati	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 5038
9	Tanah Kampung.	4000	Kelurahan Kebonsari	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 3682



No	Nama Barang	Luas M2	Letak (Lokasi) Alamat	Status Tanah	Penggunaan
10	Tanah Usaha	4060	Kelurahan Tanggul	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 1877
11	Tanah Untuk Jalan Nasional	6905	Kelurahan Sumbersari	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 4428
12	Tanah Usaha	6970	Kelurahan Kebonagung	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 1763
13	Tanah Usaha	7240	Kelurahan Sempusari	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 4343
14	Tanah Untuk Jalan Nasional	8000	Kelurahan Baratan	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 2224 (SDN BARATAN 01)
15	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	8740	Kelurahan Baratan	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 1757
16	Tanah Usaha	9165	Kelurahan Kebonsari	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 2226
17	Tanah Usaha	9240	Kelurahan Sukorambi	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 1864
18	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	10170	Kelurahan Sumbersari	Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 3474
19	Tanah Untuk Jalan Nasional	10885	Kelurahan Antirogo	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 3659
20	Tanah G. Tempat Tinggal Lain-Lain	16040	Kelurahan Kaliwates	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 4556
21	Tanah Usaha	188	Jl Udang Windu	Sertifikat	Lahan Kosong
22	Tanah Untuk Jalan Nasional	34892	Kelurahan Wirolegi Dusun Kaliwining Kec. Sumbersari	Belum Sertifikat	Tanah Akta 44, Verp No : 4105
23	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	75	Kelurahan Kaliwates	Sertifikat	Untuk Jalan Dan Taman Kota
24	Tanah Untuk Jalan Nasional	81	Kelurahan Kaliwates	Belum Sertifikat	Slm. Digunakan Jln & Tmn
25	Tanah Usaha	217	Jl. Doho 22, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari	Sertifikat	Sumur/Rumah Pompa (PDAM)
26	Tanah G. Tempat Tinggal Lain-Lain	266	Gg. Kenangan, Puring, Slawu, Kec. Patrang	Sertifikat	Jamban
27	Tanah Usaha	289	Kelurahan Jember Lor - Kreongan	Sertifikat	Sumur/Rumah Pompa (PDAM)
28	Tanah G. Tempat Tinggal Lain-Lain	316	Jl. Brantas, Kel. Tegal Boto Lor, Kec. Sumbersari	Sertifikat	Sumur/Rumah Pompa (PDAM)
29	Tanah Padang Semak Belukar	432	Jl. Perumahan Gn. Batu, Gumuk Kerang, Kec. Sumbersari	Sertifikat	Sumur/Rumah Pompa (PDAM)



No	Nama Barang	Luas M2	Letak (Lokasi) Alamat	Status Tanah	Penggunaan
30	Tanah Usaha	1313	Kelurahan Patrang	Sertifikat	Untuk Jalan
31	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel	532	Gedangan, Sukogidri, Ledokombo	Sertifikat	Pertanian
32	Tanah Usaha	220	Kelurahan Mangli	Sertifikat	Pertanian
33	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	402	Kelurahan Kaliwates	Sertifikat	Untuk Jalan
34	Tanah Usaha	3110	Kelurahan Sempusari	Sertifikat	Pertanian
35	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	271	Kelurahan Kaliwates	Belum Sertifikat	Slm. Digunakan Jln. & Tmn
36	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	750	Krajan Lor, Yosorati, Sumberbaru	Belum Sertifikat	Kolam Ikan
37	Tanah Usaha	1209	Jl Candika, Sempursari	Sertifikat	Bangunan GNI
38	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	136	Kelurahan Kaliwates	Sertifikat	Untuk Jalan Dan Taman
39	Tanah Usaha	143	Kelurahan Kaliwates	Sertifikat	Untuk Jalan Dan Taman
40	Tanah Usaha	249	Kelurahan Jember Lor	Sertifikat	Rumah Dinas Belakang POM Cendrawasih
41	Tanah Usaha	170	Kelurahan Kaliwates	Sertifikat	Untuk Jalan Dan Taman
42	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	846	Kelurahan Kaliwates	Sertifikat	Slm Digunakan Jln. & Tmn
43	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1221	Jl. Merak Perum. Kedawung Asri - Kelurahan Gebang	Sertifikat	Gedung Islamiah
44	Tanah Usaha	2000	Jl Jubung, Mangli	Belum Sertifikat	Tanah Ladang
45	Tanah Untuk Jalan Nasional	2000	Jl Jubung, Mangli	Belum Sertifikat	Tanah Ladang
46	Tanah Usaha	940	Gunungmalang, Karang Kebun, Gn. Malang, Sumberjambe	Sertifikat	SD GUNUNG MALANG 01
47	Tanah Untuk Jalan Nasional	591	Kelurahan Kaliwates	Belum Sertifikat	Slm. Digunakan Jln & Tmn
48	Tanah Usaha	1288	Krajan, Mangaran, Kec. Ajung	Sertifikat	Pertanian
49	Tanah Usaha	685	Kelurahan Kaliwates	Belum Sertifikat	Slm. Digunakan Jln & Tmn
50	Tanah Usaha	1685	Lingk. Jomerto Lor, Jumerto, Patrang	Sertifikat	Pertanian (Tanaman Sengon)



No	Nama Barang	Luas M2	Letak (Lokasi) Alamat	Status Tanah	Penggunaan
51	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2760	Kelurahan Jember Lor	Sertifikat	Gudang Dinas Pendidikan Dan Rumdin (Belakang Stadion)
52	Tanah Usaha	795	Kelurahan Kaliwates	Belum Sertifikat	Slm Digunakan Jln & Tmn
53	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2210	Jl. PB Sudirman No.10, Pagah, Jemberlor, Kec. Patrang	Sertifikat	Tanah Sawah
54	Tanah Untuk Jalan Nasional	3250	Jl Jumerto	Belum Sertifikat	Tanah Sawah
55	Tanah Usaha	3250	Jl Jubung, Mangli	Sertifikat	Tanah Sawah
56	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1273	Kelurahan Kaliwates	Sertifikat	Untuk Jalan & Taman
57	Tanah Usaha	2194	Krajan Kelurahan Jember Lor	Sertifikat	Tower Reserve
58	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	357	Jl Jubung, Mangli	Sertifikat	Tanah Sawah
59	Alam Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	700	Jl. Tanggul - Semboro (Pojukan Lampu Merah Alun-Alun Tanggul)	Belum Sertifikat	Apotik Bedadung 3
60	Alam Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	7562	Kecamatan Kencong	Belum Sertifikat	Ex. Kantor Tuti
61	Alam Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	3600	Jl Pangandaran. Antirogo	Belum Sertifikat	Tanah Sawah
62	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	125	Kelurahan Jbr Lor	Belum Sertifikat	Apotik Bedadung 2
63	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	44682	Renes, Wirowongso, Kec. Ajung	Sertifikat	Tanah Sawah
64	Tanah Bangunan Tempat Ibadah Lain-Lain	2619	Jl. Merak Perum. Kedawung Asri - Kelurahan Gebang	Sertifikat	Gedung Islamiah
65	Tanah Usaha	2758	Jl. Merak Perum. Kedawung Asri - Kelurahan Gebang	Sertifikat	Gedung Islamiah



No	Nama Barang	Luas M2	Letak (Lokasi) Alamat	Status Tanah	Penggunaan
66	Alam Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	1157	Kelurahan Kaliwates	Belum Sertifikat	Slm. Gigunakan Jln & Tmn
67	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	3056	Kelurahan Karangrejo	Sertifikat	Pom Bensin Sukerojo
68	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1687	Jl Gurami Kel. Sempusari Kec. Kaliwates	Sertifikat	Lahan Kosong / Pekarangan
69	Tanah Usaha	411	Desa Jumerto Kecamatan Patrang	Sertifikat	Pertanian
70	Tanah Untuk Jalan Nasional	5600	Kelurahan Banjarsengon	Belum Sertifikat	Ladang Jagung
71	Tanah Usaha	1085	Kelurahan Wirolegi	Sertifikat	Lahan Kosong
72	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1953	Gumukbagu, Tegal Besar, Kec. Kaliwates	Sertifikat	Lahan Kosong
73	Tanah Usaha	6300	Jl Imam Bonjol	Belum Sertifikat	Ladang Kedelai
74	Tanah Usaha	700	Kelurahan Jember Lor	Sertifikat	Apotik Bedadung 1 (F1/IDI)
75	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	220	Jl. Madura Blok F. 31 Kel. Sumbersari	Belum Sertifikat	Mess Dprd (PINJAM PAKAI IPHI)
76	Tanah Usaha	250	Jl. Letjen Panjaitan 49-51, Gumuk Kerang, Kec. Sumbersari	Belum Sertifikat	Rumah Dinas (Pemuda Pancasila)
77	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4451	Jl. Merak Perum. Kedawung Asri - Kelurahan Gebang	Sertifikat	Gedung Islamiah
78	Tanah Kebun Induk	4080	Jember, Krajan, Patrang	Sertifikat	Kantor Camat Patrang
79	Tanah Sawah Irigasi	7029	Jl Jubung, Mangli	Belum Sertifikat	Tanah Sawah
80	Tanah Usaha	4655	No, Jl. Kasuari, Krajan, Gebang, Patrang	Sertifikat	Puskesmas Banjarsengon
81	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	4126	Desa Sucopangepok	Sertifikat	Tanah Sawah
82	Tanah Bangunan Gudang	2007	Kelurahan Kaliwates	Belum Sertifikat	Fas. G. Olah Raga+ Jalan
83	Tanah Bangunan Gudang	5000	Kelurahanurahan Jember Lor	Belum Sertifikat	Belakang Stadion
84	Tanah Tegalan	8000	Kelurahan Mangli	Belum Sertifikat	Tanah Sawah
85	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	11050	Jl Jubung, Mangli	Sertifikat	Tanah Tegal



No	Nama Barang	Luas M2	Letak (Lokasi) Alamat	Status Tanah	Penggunaan
86	Tanah Usaha	5271	Jl. Merak Perum. Kedawung Asri - Kelurahan Gebang	Sertifikat	Gedung Islamiah
87	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8311	Jl Imam Bonjol, Kecamatan Sukowono	Sertifikat	Ladang Ketela
88	Tanah Usaha	1726	Jl. Manyar, Puring, Slawu, Kec. Patrang	Sertifikat	Pertanian
89	Tanah Bangunan Gudang	7562	Kecamatan Tanggul	Belum Sertifikat	Ex. Kantor Tuti
90	Tanah Sawah Irigasi	9000	Jl Merpati Indah, Antirogo	Belum Sertifikat	Tanah Sawah
91	Tanah Padang Rumput	2412	Kelurahan Kaliwates	Sertifikat	Slm. Digunakan Jln & Tmn
92	Tanah Untuk Taman Lain-Lain	2490	Desa Kaliwates	Belum Sertifikat	Selama Digunakan Taman
93	Tanah Bangunan Gudang	2500	Kelurahan Kaliwates	Belum Sertifikat	Fas. G. Olah Raga + Jalan
94	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2538	Kaliwates Kidul, Kaliwates	Sertifikat	Pertanian
95	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	500	Kelurahan Kaliwates / DESA MANGARAN - AJUNG	Sertifikat	SDN MANGARAN 01
96	Tanah Usaha	1029	Ds. Wirowongso	Sertifikat	Tanah Kosong
97	Tanah Usaha	8810	Klanceng, Ajung, Kec. Ajung	Sertifikat	Tanah Tegal
98	Tanah Usaha	10718	Jl. Dr. Sutomo - Kelurahan Kepatihan	Sertifikat	Rumah Dinas
99	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	360	Jalan KH Siddiq 53 Talangsari, Talangsari, Kec. Kaliwates	Belum Sertifikat	Puskesmas Jember Kidul
100	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1495	Kelurahan Kaliwates	Sertifikat	Eks. Kantor Kesos
101	Tanah Usaha	22500	Area Sawah/Kulon, Baratan, Kec. Patrang	Sertifikat	Tanah Sawah
102	Tanah Untuk Jalan Nasional	1090	Jl. Dr. Sutomo - Kelurahan Kepatihan	Sertifikat	Rumah Dinas
103	Tanah Bangunan Gudang	1	Jember	Belum Sertifikat	Bangunan Gedung
104	Tanah Kebun Induk	10840	Dsn Semenggu	Belum Sertifikat	Kebun Tebu



No	Nama Barang	Luas M2	Letak (Lokasi) Alamat	Status Tanah	Penggunaan
105	Tanah Usaha	2928	Jember, Gerdu, Sempusari, Kaliwates	Sertifikat	Pertanian
106	Tanah Usaha	4976	Jl. Hayam Wuruk, Sempusari, Kec. Kaliwates	Sertifikat	Pertanian
107	Tanah Bangunan Gudang	3378	Kelurahan Sempusari, Mrapa, Kec. Kaliwates	Sertifikat	Rencana Gedung Pkk
108	Tanah Kebun Induk	10547	Mangli	Sertifikat	Tanah Perkebunan
109	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	661	Jl. Panjaitan No. 40 Kel. Sumbersari	Sertifikat	Rumah Wakil Ketua ((PINJAM PAKAI BPOM)
110	Tanah Kebun Induk	14400	Dsn Semenggu	Belum Sertifikat	Kebun Tebu
111	Tanah Usaha	10088	Krajan, Antirogo, Kec. Sumbersari	Sertifikat	Lapangan
112	Tanah Padang Rumput	3879	Jl. Cadika 5, Gerdu, Sempusari, Kec. Kaliwates	Sertifikat	Pertanian
113	Tanah Bangunan Gudang	3910	Kelurahan Kaliwates	Belum Sertifikat	Fas. G. Olah Raga + Jalan
114	Tanah Usaha	3975	Kelurahan Mangli	Sertifikat	Pertanian
115	Tanah Usaha	9563	Area Sawah/Kebun, Kranjingan, Sumbersari	Sertifikat	Pertanian
116	Tanah Usaha	10414	Jl. Curah Udang, Wirowongso, Kec. Ajung	Sertifikat	Pertanian
117	Tanah Usaha	341	Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jombang	Sertifikat	Wisma Daerah Praja Mukti
118	Tanah Usaha	342	Kelurahan Kebonsari	Sertifikat	Wisma Daerah Praja Mukti
119	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	876	Kelurahan Slawu	Sertifikat	Ex. Kantor Capil / Sanggar Pramuka
120	Tanah Usaha	5129	Kaliwates Kidul, Kaliwates	Sertifikat	Pertanian
121	Tanah Usaha	5362	Gerdu, Sempusari, Kaliwates	Sertifikat	Tanah Lapang
122	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	20330	Dsn. Kedung Pereng	Sertifikat	Kebun Tebu / Rencana IPLT
123	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	350	Kelurahan Gebang - Jl. Manggar 7	Sertifikat	Pdam
124	Tanah Bangunan Gudang	1	Jember	Belum Sertifikat	Bangunan Gedung



No	Nama Barang	Luas M2	Letak (Lokasi) Alamat	Status Tanah	Penggunaan
125	Tanah Usaha	1030	Puring, Kelurahan Slawu, Kec. Patrang	Sertifikat	Tandon Pdam
126	Tanah Untuk Jalan Nasional	262	Kelurahan Jember Kidul - Jl. Raden Rahmat 1 No. 2	Sertifikat	Pdam
127	Tanah Untuk Jalan Nasional	7562	Renes, Wirowongso, Kec. Ajung	Sertifikat	Pertanian
128	Tanah Usaha	3399	Gedangan, Sukogidri, Ledokombo	Sertifikat	Lahan Sengon
129	Tanah Untuk Jalan Nasional	2383	Kelurahan Kaliwates	Sertifikat	Eks. Kantor Kesos / Jember Park / Best FM
130	Tanah Usaha	1582	Jl. KH. Shiddiq No. 33 Kelurahan Jember Kidul	Sertifikat	Rudin Sopir
131	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	22067	Jambutan, Antirogo, Kec. Sumbersari	Sertifikat	Pertanian
132	Tanah Kampung.	2247	Jawaan, Patemon, Kec. Pakusari	Sertifikat	Untuk Pengolahan Susu
133	Tanah Bangunan Gudang	477	Jl. Nusantara Blok H No. 18 Kel. Kaliwates	Belum Sertifikat	Rumah Dinas Wakil Ketua (PINJAM PAKAI BAZNAZ)
134	Tanah Bangunan Gudang	11737	Kelurahan Kaliwates	Belum Sertifikat	Gedung Gor Kaliwates
135	Tanah Usaha	443	Jl. Imam Bonjol No. 15 Kec. Kaliwates	Sertifikat	Pdam
136	Tanah Bangunan Gudang	1375	Jl. Nias No. 11 Jember Kel. Sumbersari	Belum Sertifikat	Rumah Dinas Ketua
137	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3210	Kelurahan Tegalgede	Sertifikat	Kantor Garasi Pmk
138	Tanah Kebun Induk	50000	Dsn Karangpring, Gebang	Sertifikat	Kebun Tebu
139	Tanah Kebun Induk	52000	Ds. Wirowongso	Belum Sertifikat	Kebun Tebu
140	Tanah Usaha	5506	Ds. Tgl Waru Kecamatan Mayang	Sertifikat	Ex. Kantor Tuti
141	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1996	Ajung Kulon, Ajung, Kec. Ajung	Sertifikat	Pertanian
142	Tanah Bangunan Gudang	6229	Rambipuji	Belum Sertifikat	Ex. Kantor Tuti
143	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	250971	Krajan II - Puger Kulon	Sertifikat	Pekarangan



No	Nama Barang	Luas M2	Letak (Lokasi) Alamat	Status Tanah	Penggunaan
144	Tanah Bangunan Gudang	6567	Jl. Dr. Wahidin No. 1 (Depan Polsek Kalisat)	Sertifikat	Ex. Kantor Tuti
145	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1702	Jl. Dr. Sutomo - Kelurahan Kepatihan	Sertifikat	Rudin Pegawai
146	Tanah Bangunan Apotik	3280	Lingk. Jomerto Lor, Jumerto, Patrang	Sertifikat	Pertanian
147	Tanah Usaha	1190	Kelurahan Gebang - Jl. Kaca Piring	Sertifikat	Sumur Bor Pdam
148	Tanah G. Tempat Tinggal Lain-Lain	1811	Jl. Khairil Anwar Krajan, Sukowono (Dekat SPBU SUKOWONO)	Sertifikat	Kebun Tebu / Pasar Hewan
149	Tanah Kebun Induk	80000	Semenggu, Bintoro, Patrang	Belum Sertifikat	Kebun Tebu
150	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	848	Ds. Condong Catur	Sertifikat	Asrama Mahasiswa Jbr
151	Tanah Usaha	3600	Kelurahan Sumbersari	Sertifikat	Kantor Walikota
152	Tanah Usaha	91692	Ajung Kulon, Kec. Ajung	Sertifikat	Tanah Sawah
153	Tanah Usaha	647000	Karetan - Grenden Kec. Puger	Sertifikat	Pekarangan
154	Tanah Kebun Induk	96750	Jl Tk Bunga Teratai	Belum Sertifikat	Kebun Tebu
155	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	10000	Kelurahan Kaliwates	Belum Sertifikat	Eks. Kantor Kesos
156	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1600	Jl. Dewi Sartika	Sertifikat	Rudin Pegawai / LP3, PPT
157	Tanah Untuk Jalan Nasional	663	Jl. Gajah Mada 23 Kel. Kaliwates Kidul Kec. Kaliwates	Sertifikat	Pdam (Condro)
158	Tanah Usaha	983	Kelurahan Kaliwates	Sertifikat	Pertanian
159	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	36100	Kelurahan Kebon Agung	Sertifikat	Hotel & Pemandian Kebon Agung
160	Tanah Untuk Taman Lain-Lain	48357	Desa Tanggul	Belum Sertifikat	Pemandian Patemon
161	Tanah Usaha	1516	Kelurahan Sumbersari	Sertifikat	Rumah Dinas Pdam
162	Tanah Usaha	2590	Kelurahan Kaliwates	Sertifikat	Pertanian
163	Tanah Usaha	131580	Desa Sumber Rejo	Sertifikat	Watu Ulo
164	Tanah Bangunan Apotik	3280	Kelurahan Kaliwates	Sertifikat	Pertanian
165	Tanah Usaha	2210	Jl. Pb. Sudirman Kelurahan Jember Lor	Sertifikat	Eks. Bhs



No	Nama Barang	Luas M2	Letak (Lokasi) Alamat	Status Tanah	Penggunaan
166	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4380	Jl. Gurami Krajan Kecamatan Kaliwates	Sertifikat	Pertanian
167	Tanah Bangunan Apotik	4575	Kelurahan Kaliwates - Sebelah Pemakaman Cina	Sertifikat	Lahan Jagung
168	Tanah Usaha	23310	Kelurahan Jember Lor	Sertifikat	Alun-Alun Jember
169	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		Jl. Dewi Sartika	Sertifikat	Pinjam Pakai Bawaslu
170	Tanah Kebun Induk	520	Jl. Cendrawasih No 21, Kel. Slawu	Belum Sertifikat	Lahan Parkir Dan Olahraga (PINJAM PAKAI BADAN PUSAT STATISTIK)
171	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	249	Jember Lor	Sertifikat	RUMAH DINAS BELAKANG POM PATRANG
172	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	2596	Jl. Kauman, Kepatihan, Kec. Kaliwates	Sertifikat	Gedung Ex GNI
173	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1976	Kelurahan Kepatihan	Belum Sertifikat	Eks. Disnakertrans
174	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	220	Perumahan Milenia Jl. Mataram Blok A Keluarahan Sempusari Kecamatan Kaliwates	Surat Hak Pakai (Shp)	Tanah Omah Rembug
175	Tanah Tandus Berpasir/Pasir	37840	Jalan Lintas Selatan Jember - Candipuro Desa Mojomulyo Kecamatan Puger	Surat Hak Pakai (Shp)	Pantai Pesisir Mojomulyo
176	Tanah Tandus Berpasir/Pasir	2471	Jalan Lintas Selatan Jember - Candipuro Desa Mojomulyo Kecamatan Puger	Surat Hak Pakai (Shp)	Pantai Pesisir Mojomulyo
177	Tanah Tandus Berpasir/Pasir	10100	Jalan Lintas Selatan Jember - Candipuro Desa Mojomulyo Kecamatan Puger	Surat Hak Pakai (Shp)	Pantai Pesisir Mojomulyo
178	Tanah Tandus Berpasir/Pasir	96869	Jalan Lintas Selatan Jember - Candipuro Dusun Getem Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas	Surat Hak Pakai (Shp)	Pantai Pesisir Mayangan



No	Nama Barang	Luas M2	Letak (Lokasi) Alamat	Status Tanah	Penggunaan
179	Tanah Kering Lain-Lain	2785	Jl. Branjangan, Semenggu, Bintoro, Kecamatan Patrang	Sertifikat	Tanah Kering
180	Tanah Kering Lain-Lain	10000	Jl. Manggar 9, Gebang Tengah, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang	Sertifikat	Tanah Kering
181	Tanah Kering Lain-Lain	20000	Jl. Yos Sudarso, Sumber Rejo, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Patrang	Belum Sertifikat	Tanah Kering
182	Tanah Kering Lain-Lain	4000	Jl. Cadika, Gerdu, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates	Belum Sertifikat	Tanah Kering
183	Tanah Sawah Irigasi	500	Jl. Cadika, Gg 3, Mrapa, Kelurahan Sempusari. Kecamatan Kaliwates	Belum Sertifikat	Sawah
184	Tanah Tegalan	4610	Jl. Brigjen Syaifudin, Krajan, Kecamatan Sukorambi	Belum Sertifikat	Tanah Tegal
185	Tanah Tegalan	4500	Jl. Gurami, Mrapa, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates	Belum Sertifikat	Tanah Tegal
186	Tanah Tegalan	3500	Jl. Branjangan, Semenggu, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang	Sertifikat	Tanah Tegal
187	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	300	Jl. Hos Cokroaminoto	Belum Sertifikat	Tanah Kosong

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025



KIB B (PERALATAN DAN MESIN)

No	Nama Barang	Merk	Tahun	Kondisi
1	Sepeda Motor	Trail Suzuki TS 125	2002	Baik
2	Sepeda Motor	Trail Suzuki TS 125	2002	Baik
3	Sepeda Motor	GLK	1992	Baik
4	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Suzuki Ertiga	2014	Baik
5	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Suzuki Ertiga	2014	Baik
6	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Mitsubishi	2013	Baik
7	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Toyota LGX	2000	Baik
8	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Toyota COROLLA	2001	Baik
9	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Mitsubishi STRADA	2014	Baik
10	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Toyota SOLUNA	2001	Rusak
11	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Inova	2012	Baik
12	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Avanza	2015	Baik
13	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Avanza	2015	Baik
14	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Avanza	2015	Rusak
15	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Avanza	2015	Baik
16	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Toyota Avanza	2015	Baik
17	Pick Up	SUZUKI PICKUP	2015	Baik
18	Pick Up	SUZUKI PICKUP	2016	Rusak
19	Pick Up	SUZUKI PICKUP	2016	Baik
20	Pick Up	SUZUKI PICKUP	2016	Rusak
21	Sepeda Motor	Honda, Supra 125 Cc Helm F1	2012	Baik
22	Sepeda Motor	Honda, Supra 125 Cc Helm F1	2008	Baik
23	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	2013	Baik
24	Sepeda Motor	Yamaha -Soul GT	2014	Baik
25	Sepeda Motor	Honda, Supra 125 Cc Helm F1	2006	Baik



No	Nama Barang	Merk	Tahun	Kondisi
26	Sepeda Motor	Honda SUPRA	2007	Baik
27	Sepeda Motor	Honda	2007	Baik
28	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z1	2012	Baik
29	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z1	2012	Baik
30	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z1	2012	Baik
31	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z1	2012	Baik
32	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z1	2012	Baik
33	Sepeda Motor	Honda SUPRA	2012	Baik
34	Sepeda Motor	Yamaha -Soul GT	2013	Baik
35	Sepeda Motor	Yamaha -Soul GT	2013	Baik
36	Sepeda Motor	Yamaha -Soul GT	2013	Baik
37	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	2013	Baik
38	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	2013	Baik
39	Sepeda Motor	Yamaha	2013	Baik
40	Sepeda Motor	Yamaha X RIDE	2013	Baik
41	Sepeda Motor	Kawasaki	2013	Baik
42	Sepeda Motor	Yamaha	2014	Baik
43	Sepeda Motor	Yamaha	2014	Baik
44	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Toyota Kijang/ Innova	2006	Rusak
45	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Innova	2007	Baik
46	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Grand New Avanza	2018	Baik
47	Sepeda Motor	Kawasaki LX 150G	2015	Baik
48	Sepeda Motor	Kawasaki LX 150G	2015	Baik
49	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA HI ACE PREMIO	2021	Baik



No	Nama Barang	Merk	Tahun	Kondisi
50	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA HI ACE COMMUTER MANUAL	2021	Baik
51	Sepeda Motor	KAWASAKI KLX 150 BF	2021	Baik
52	Sepeda Motor	KAWASAKI KLX 150 BF	2021	Baik
53	Sepeda Motor	KAWASAKI KLX 150 BF	2021	Baik
54	Sepeda Motor	KAWASAKI KLX 150 BF	2021	Baik
55	Station Wagon	Toyota FORTUNER	2015	Rusak
56	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Toyota Kijang Innova	2006	Baik
57	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Avanza	2013	BAIK

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025

KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)

No	Nama Barang	Kondisi	Luas	Tahun	Alamat (lokasi)	Titik Koordinat
1	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	100	1970	Jl. Tanggul - Semboro (pojokan Lampu Merah alun-alun tanggul)	- 8.163340,113.452300
2	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	139	1970	Jl. Dewi Sartika (DINSOS)	- 8.171491,113.701845
3	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	139	1970	Jl. Dewi Sartika (DINSOS)	- 8.171491,113.701845
4	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	139	1970	Jl. Dewi Sartika (DINSOS)	- 8.171491,113.701845
5	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	139	1970	Jl. Dewi Sartika (GUDANG POL PP)	- 8.171491,113.701845
6	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	139	1970	Jl. Dewi Sartika (GUDANG POL PP)	- 8.171491,113.701845
7	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	82	1970	Jl. Dr. Sutomo - Kelurahan Kapatihan / Jl. Setiabudi	-8.176721, 113.695198
8	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	82	1970	Jl. Dr. Sutomo - Kelurahan	-8.176721, 113.695198



No	Nama Barang	Kondisi	Luas	Tahun	Alamat (lokasi)	Titik Koordinat
					Kepatihan / Jl. Setiabudi	
9	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	82	1970	Jl. Dr. Sutomo - Kelurahan Kepatihan / Jl. Setiabudi	-8.176721, 113.695198
10	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	82	1970	Jl. Dr. Sutomo - Kelurahan Kepatihan / Jl. Setiabudi	-8.176721, 113.695198
11	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	82	1970	Jl. Dr. Sutomo - Kelurahan Kepatihan / Jl. Setiabudi	-8.176721, 113.695198
12	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	82	1970	Jl. Dr. Sutomo - Kelurahan Kepatihan / Jl. Setiabudi	-8.176721, 113.695198
13	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	82	1970	Jl. Dr. Sutomo - Kelurahan Kepatihan / Jl. Setiabudi	-8.176721, 113.695198
14	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	82	1970	Jl. Dr. Sutomo - Kelurahan Kepatihan / Jl. Setiabudi	-8.176721, 113.695198
15	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	82	1970	Jl. Dr. Sutomo - Kelurahan Kepatihan / Jl. Setiabudi	-8.176721, 113.695198
16	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	55	1970	Jl. KH. Shiddiq No. 33 Kelurahan Jember Kidul	- 8.179088, 113.693136
17	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	55	1970	Jl. KH. Shiddiq No. 33 Kelurahan Jember Kidul	- 8.179088, 113.693136
18	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	55	1970	Jl. KH. Shiddiq No. 33 Kelurahan Jember Kidul	- 8.179088, 113.693136
19	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	55	1970	Jl. KH. Shiddiq No. 33 Kelurahan Jember Kidul	- 8.179088, 113.693136
20	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	55	1970	Jl. KH. Shiddiq No. 33 Kelurahan Jember Kidul	- 8.179088, 113.693136
21	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	55	1970	Jl. KH. Shiddiq No. 33 Kelurahan Jember Kidul	- 8.179088, 113.693136



No	Nama Barang	Kondisi	Luas	Tahun	Alamat (lokasi)	Titik Koordinat
22	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	55	1970	Jl. KH. Shiddiq No. 33 Kelurahan Jember Kidul	- 8.179088,113.693136
23	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	55	1970	Jl. KH. Shiddiq No. 33 Kelurahan Jember Kidul	- 8.179088,113.693136
24	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	150	1971	Jl. R.A. Kartini No.13, Kampungtengah, Jemberlor, Kec. Patrang	- 8.172160491459886, 113.70108083649819
25	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	400	1975	Jl. Sunan Darajat No 7 Jember Kidul Kec Kaliwates	-8.18305, 113.69131
26	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	200	1980	Kelurahan Jember Lor	-8.166602, 113.704664
27	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	100	1980	Jl. Dr. Subandi 1 Gang 1 Kelurahan Jemberlor	- 8.155356,113.700768
28	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	250	1980	Jl. Dharmawangsa No. 176	- 8.178320,113.706652
29	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	250	1980	Kelurahan Slawu	- 8.155274,113.695306
30	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	400	1980	Ds. Balung Lor	-
31	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	400	1980	Jl. Dr. Wahidin No. 1 (Depan Polsek Kalisat)	- 8.128640,113.811005 (Penggunaan DISPERINDAG)
32	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	100	1980	Kecamatan Kencong	-
33	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	400	1980	Rambipuji	-
34	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	300	1980	Jl. Diponegoro, Tekoan, Tanggul Kulon, Kec. Tanggul	- 8.161348154198148, 113.45158425986845
35	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	300	1990	Jl. Matarram	-
36	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	300	1998	Ds. Tgl Waru Kecamatan Mayang	- 8.174483,113.797374 (Penggunaan Kantor Kec. Mayang)
37	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	-	1970	Jl. Madura Blok F. 30 Kel. Summersari	-8.171283, 113.711627



No	Nama Barang	Kondisi	Luas	Tahun	Alamat (lokasi)	Titik Koordinat
38	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	-	1970	Sriwijaya, Kramat, Kranjingan, Sumbersari	-8.18963844653718, 113.72124886353366
39	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	-	2014	Jl. Ahmad Yani No.2, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang	- 8.166465639729967, 113.70491778158008
40	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik	-	2014	Jl. Letjen Panjaitan	- 8.178651, 113.706487
41	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	-	1970	Jl. A Yani No 02	-8.17052, 113.70253
42	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	-	1970	Jl. Madura Blok F. 31 Kel. Sumbersari	-8.177453, 113.712814
43	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	-	1970	Jl. Nias No. 11 Jember Kel. Sumbersari	-8.171283, 113.711627
44	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	-	1970	Jl. Nusantara Blok H No. 18 Kel. Kaliwates	- 8.182980092175473, 113.68061475795399
45	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Baik	-	1970	Jl. Panjaitan No. 40 Kel. Sumbersari	- 8.178651, 113.706487
46	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI Lain-Lain	Baik	-	2019	Jl. Dewi Sartika 54 Jbr	- 8.171904990546752, 113.70174754391923
47	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	-	1970	Jl. Dewi Sartika 54 Jbr	- 8.171904990546752, 113.70174754391923
48	RUMAH NEGARA GOLONGAN II Lain-Lain	Baik	-	2016	Jl. Dewi Sartika 54 Jbr	- 8.171904990546752, 113.70174754391923
49	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	1200	2021	Jl. Kauman, Kepatihan, Kec. Kaliwates	-8.176347, 113.702087

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025

**KIB E (ASET TETAP LAINNYA)**

No	Nama Barang	Keterangan Barang	Tahun
1	Sejarah	Buku Djember Tempo Doeloe	2016
2	Sejarah	Buku Djember Tempo Doeloe	2016
3	Sejarah	Buku Djember Tempo Doeloe	2016
4	Sejarah	Buku Djember Tempo Doeloe	2016
5	Sejarah	Buku Djember Tempo Doeloe	2016

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025

KIB G (KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA)

No	Nama Barang	Keterangan Barang	Tahun	Luas	Lokasi	Titik Koordinat
1	Kerja Sama Pemanfaatan Tanah	Tanah Trunojoyo (Luas Tanah 1.976)	1970	1.976	Kelurahan Kepatihan	-8.174943, 113.702395
2	Kerja Sama Pemanfaatan Aset Tetap Lainnya	Kecamatan Kencong (Luas Tanah 40.000)	2014	-	-	-
3	Sewa Tanah	Pekarangan	2013	1.011.842	Puger Wetan	-8.3464513, 113.488557
4	Sewa Tanah	Tanah Akta 44, Verp No : 2543	1970	1.779	Kelurahan Patemon	-8.126980, 113.744377
5	Sewa Tanah	Tanah Tegal	1970	145.551	Kelurahan Bintoro - Lingkungan Mojan	-8.1274994, 113.6963926
6	Sewa Tanah	Tanah Akta 44, Verp No : 4786	1970	4.135	Kelurahan Antirogo	-8.142225, 113.735729
7	Sewa Tanah	Tanah Akta 44, Verp No : 1718	1970	9.500	Kelurahan Tegal Besar	-8.190716, 113.680499
8	Sewa Tanah	Tanah Akta 44, Verp No : 3990	1970	14.830	Kelurahan Tegal Besar	-8.196805, 113.669626
9	Sewa Tanah	Tanah Tegal	1970	64.919	Kelurahan Bintoro - Semenggu	-8.1242692, 113.6997132
10	Sewa Tanah	Pertanian	2002	61.681	Area Sawah/Kulon, Baratan, Kec. Patrang	-8.114325, 113.712294
11	Sewa Tanah	Wisata Rembangan	2005	429.839	Darungan, Kemuning Lor, Arjasa	2 Sertifikat [(13)-8.084737, 113.690462 ;



No	Nama Barang	Keterangan Barang	Tahun	Luas	Lokasi	Titik Koordinat
						(12)-8.080218, 113.690356]
12	Sewa Tanah	Tanah Sawah	1970	3.018	Jl Jubung, Mangli	8.18500, 113.64333
13	Sewa Tanah	Gedung Islamiah	1998	2.198	Jl. Merak Perum. Kedawung Asri - Kelurahan Gebang	-8.156487,113.685200
14	Sewa Tanah	Rumah Penduduk	1970	47.966	Kelurahan Bintoro	-8.125289, 113.697279
15	Sewa Tanah	Tanah Sawah	1970	3.539	Jl Jubung, Mangli	8.18028, 113.64222
16	Sewa Tanah	Tanah Sawah	1970	5.000	Kelurahan Mangli	8.18000, 113.64222
17	Sewa Tanah	Rumah Kavling	1970	8.899	Kelurahan Bintoro	-8.123270, 113.699348
18	Sewa Tanah	Pertanian	1996	2.226	Kelurahan Mangli	-8.200415,113.650682
19	Sewa Tanah	Pertanian	1996	2.510	Jl. Cadika, Gerdu, Sempusari, Kec. Kaliwates	-8.179680, 113.659849
20	Sewa Tanah	Pertanian	1996	2.702	Tanjung, Mangli, Kaliwates	-8.180428,113.644782
21	Sewa Tanah	Pertanian	1996	2.943	Kelurahan Mangli	8.18389, 113.64222
22	Sewa Tanah	Tanah Lapang	2001	7.990	Lingk. Jomerto Lor, Jumerto, Patrang	-8.133285, 113.686410
23	Sewa Tanah	Gedung Islamiah	1998	9.635	Jl. Merak Perum. Kedawung Asri - Kelurahan Gebang	-8.156487,113.685200
24	Sewa Tanah	Pertanian	1996	3.629	Kelurahan Mangli	-8.197949,113.651268
25	Sewa Tanah	Pertanian	1993	10.709	Jambutan, Antirogo, Sumbersari	-8.165863, 113.744439
26	Sewa Tanah	Pertanian	1996	4.280	Kelurahan Mangli	8.18417, 113.64667



No	Nama Barang	Keterangan Barang	Tahun	Luas	Lokasi	Titik Koordinat
27	Sewa Tanah	Pertanian	1996	5.023	Kelurahan Mangli	8.18556, 113.64722
28	Sewa Tanah	Pertanian	1996	6.729	Tanjung, Mangli, Kaliwates	-8.185726, 113.643794
29	Sewa Tanah	Tanah Tegal	1970	234.354	Semenggu, Bintoro, Patrang	-8.130463, 113.695317
30	Sewa Tanah	Kebun Tebu	1970	11.970	Durjo, Karangpring, Kec. Sukorambi	-8.130463, 113.695317
31	Sewa Tanah	Kebun Tebu	1970	22.618	Durjo, Karangpring, Kec. Sukorambi	-8.094867, 113.661490
32	Sewa Tanah	Pertanian	1996	8.467	Kelurahan Mangli	8.18972, 113.64556
33	Sewa Tanah	Pertanian	2001	4.795	Jl. Hayam Muruk, Sempusari, Kaliwates	-8.187915, 113.656016
34	Sewa Tanah	Kebun Tebu	1970	4.875	Lengkong Barat, Mrawan, Mayang	-8.216823, 113.732020
35	Sewa Tanah	Kebun Tebu	1970	62.944	Dsn Semenggu	-8.130714, 113.695884
36	Sewa Tanah	Pertanian	2001	2.390	Kelurahan Mangli	8.18722, 113.64222

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025

KIB G (KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA)

No	Nama Barang	Keterangan Barang	Tahun
1	Software.....	Aplikasi E-SIPPA Berbasis WEB	2017
2	Software.....	Software SIMDA	2013

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025



KIB G (ASET LAIN-LAIN)

No	Nama Barang	Keterangan Barang	Tahun
1	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Mobil	1991
2	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Brankas	1980
3	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja Tulis	1989
4	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja Tulis	1989
5	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja Tulis	1989
6	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Lemari Kayu	1990
7	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Lemari Pendek	1990
8	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Lemari Pendek	1990
9	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Lemari Panjang	1997
10	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Mesin Foto Copy	1999
11	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Lemari Buku	2000
12	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Lemari Kayu	2005
13	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Brankas	2006
14	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Note Book	2010
15	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Note Book	2010
16	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Camera Digital	2008
17	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja Rapat	1992
18	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Sepeda Motor	2001
19	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Sepeda Motor	2001
20	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Sepeda Motor	1996
21	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
22	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
23	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
24	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
25	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
26	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
27	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
28	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
29	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
30	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
31	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
32	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
33	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
34	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
35	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
36	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
37	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
38	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
39	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
40	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
41	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
42	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
43	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994



No	Nama Barang	Keterangan Barang	Tahun
44	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
45	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
46	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
47	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
48	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
49	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
50	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	1994
51	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	meja	1997
52	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	meja	2003
53	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi	2003
54	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
55	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
56	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
57	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
58	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
59	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
60	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
61	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
62	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
63	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
64	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
65	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
66	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
67	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
68	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
69	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
70	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
71	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
72	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
73	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
74	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
75	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
76	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
77	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja	2003
78	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Rak besi	1970
79	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Filling Besi	1996
80	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Filling Besi	2000
81	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Filling Besi	2002
82	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Filling Besi	2002
83	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Filling Besi	1970
84	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	lemari sorok	1970
85	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	lemari sorok	1970
86	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	lemari kayu	1970
87	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	kursi tamu	1998



No	Nama Barang	Keterangan Barang	Tahun
88	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	kursi putar	1998
89	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	meja 1/2 biro	2003
90	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	meja 1/2 biro	2003
91	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	meja 1/2 biro	2001
92	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	meja 1/2 biro	2001
93	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja Rapat	1992
94	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja Rapat	1992
95	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	meja 1/2 biro	2002
96	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	2002
97	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	2002
98	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	2002
99	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	2002
100	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	2002
101	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	2002
102	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	2002
103	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	2002
104	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	2002
105	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	2002
106	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	2002
107	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	2002
108	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
109	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
110	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
111	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
112	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
113	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
114	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
115	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
116	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
117	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
118	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
119	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
120	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
121	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
122	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
123	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
124	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
125	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
126	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
127	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
128	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
129	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
130	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
131	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995



No	Nama Barang	Keterangan Barang	Tahun
132	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
133	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
134	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
135	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
136	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
137	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
138	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
139	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
140	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
141	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
142	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
143	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
144	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
145	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
146	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
147	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
148	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
149	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
150	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
151	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
152	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
153	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
154	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
155	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
156	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
157	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
158	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
159	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
160	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
161	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
162	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
163	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
164	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
165	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
166	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
167	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
168	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
169	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
170	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
171	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
172	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
173	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
174	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
175	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995



No	Nama Barang	Keterangan Barang	Tahun
176	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
177	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
178	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
179	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
180	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
181	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
182	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
183	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
184	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
185	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
186	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
187	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
188	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
189	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	AC Split	2008
190	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	AC	2006
191	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja Kerja Pimpinan	2007
192	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja Kerja Pimpinan	2009
193	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja Kerja Pimpinan	1992
194	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja rapat	1992
195	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja rapat	1992
196	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja rapat	1992
197	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja rapat	1992
198	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja rapat	1992
199	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja rapat	1992
200	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja rapat	1992
201	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja rapat	1992
202	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja rapat	1992
203	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja rapat	1992
204	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja rapat	1992
205	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja rapat	1992
206	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja rapat	1992
207	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	AC	2008
208	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	AC	2008
209	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	AC	2006
210	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	AC Split 1 PK	2008
211	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	PC Unit	2007
212	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Printer	2006
213	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Printer	2007
214	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Printer Dot Matrik	2005
215	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Printer	2008
216	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Printer	2013
217	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	UPS	2007
218	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Tamu	2001
219	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Tamu	2001



No	Nama Barang	Keterangan Barang	Tahun
220	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja 1/2 Biro	2002
221	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja 1/2 Biro	2002
222	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja 1/2 Biro	2002
223	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja 1/2 Biro	2002
224	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja 1/2 Biro	2002
225	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Meja 1/2 Biro	2002
226	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kaca Bening	2008
227	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kaca Bening	2008
228	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Staf	1981
229	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Staf	1981
230	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Staf	1981
231	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Staf	1981
232	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Staf	1981
233	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Staf	1981
234	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Staf	1981
235	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Staf	1981
236	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
237	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
238	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
239	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
240	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
241	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
242	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
243	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
244	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
245	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
246	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
247	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
248	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
249	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
250	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
251	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
252	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
253	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
254	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
255	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
256	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
257	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
258	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
259	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
260	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
261	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
262	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
263	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985



No	Nama Barang	Keterangan Barang	Tahun
264	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
265	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1985
266	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Kasubag	1985
267	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Kasubag	1985
268	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Kasubag	1985
269	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	1985
270	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Almari Pakaian	1989
271	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Almari Pakaian	1989
272	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
273	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
274	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Kursi Lipat	1995
275	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Almari Pakaian	1989
276	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Putar	1989
277	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Jam Dinding	1990
278	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Almari Pakaian	1989
279	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Almari Pakaian	1989
280	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Almari Pakaian	1989
281	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1990
282	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Panjang	1990
283	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Filing Kabinet	1991
284	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Filing Kabinet	1991
285	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Putar	1995
286	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Tulis	1995
287	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Tulis	1995
288	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Komputer	1998
289	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Tulis	1999
290	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Komputer	2000
291	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Filling Kabinet	2001
292	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	2001
293	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	2001
294	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	2001
295	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	2001
296	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	2001
297	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	2001
298	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	2001
299	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	2001
300	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	2001
301	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	2001
302	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Tempat Tidur Set	2002
303	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Filing Kabinet	2004
304	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Filing Kabinet	2004
305	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Filing Kabinet	2004
306	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Filing Kabinet	2004
307	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Filing Kabinet	2004



No	Nama Barang	Keterangan Barang	Tahun
308	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Filing Kabinet	2004
309	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Filing Kabinet	2004
310	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Filing Kabinet	2004
311	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Filing Kabinet	2004
312	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2004
313	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Komputer	2005
314	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Filing Kabinet	2006
315	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Komputer Note Book	2006
316	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2004
317	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2004
318	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2004
319	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2004
320	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Putar	2006
321	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2006
322	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2006
323	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2007
324	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2007
325	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer Dot Matrik	2007
326	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer Dot Matrik	2007
327	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	meja 1/2 biro	2002
328	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	meja 1/2 biro	2002
329	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2008
330	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Putar	2006
331	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Putar	2006
332	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Putar	2006
333	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Putar	2006
334	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2008
335	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2008
336	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2008
337	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2008
338	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2008
339	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Receiver	2008
340	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Televisi	2008
341	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Televisi	2008
342	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2009
343	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2009
344	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1990
345	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1990
346	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kursi Staf	1990
347	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Exhaust Fan	2010
348	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Kabel	2010
349	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Korden	2010
350	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Mesin Penghancur Kertas	2010
351	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Mesin Penghancur Kertas	2010



No	Nama Barang	Keterangan Barang	Tahun
352	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Mesin Penghancur Kertas	2010
353	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2010
354	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2010
355	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2010
356	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2010
357	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2010
358	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Scanner	2010
359	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	1985
360	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	1985
361	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	1985
362	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	1985
363	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	1985
364	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	1985
365	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	1985
366	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	1985
367	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	1985
368	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	1985
369	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Meja Kerja Staf	1985
370	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Exhaust Fan	2011
371	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Exhaust Fan	2011
372	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Exhaust Fan	2011
373	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Exhaust Fan	2011
374	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Exhaust Fan	2011
375	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Exhaust Fan	2011
376	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Exhaust Fan	2011
377	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Exhaust Fan	2011
378	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Exhaust Fan	2011
379	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Exhaust Fan	2011
380	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Exhaust Fan	2011
381	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Exhaust Fan	2011
382	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Gambar Presiden Dan Wakil	2011
383	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Gambar Presiden Dan Wakil	2011
384	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
385	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
386	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
387	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
388	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
389	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
390	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
391	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
392	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
393	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
394	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
395	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011



No	Nama Barang	Keterangan Barang	Tahun
396	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
397	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
398	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
399	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
400	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
401	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
402	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
403	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2011
404	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Exhaust Fan	2010
405	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Exhaust Fan	2010
406	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Exhaust Fan	2010
407	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Mesin Penghancur Kertas	2012
408	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Mesin Penghancur Kertas	2012
409	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Mesin Penghancur Kertas	2012
410	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Mesin Penghancur Kertas	2012
411	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Pesawat Telephone	1990
412	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Facsimile	2008
413	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Facsimile	2008
414	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Cctv Dan Kelengkapan	2010
415	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Facsimile	2010
416	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	kursi lipat	1990
417	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	kursi lipat	1990
418	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	kursi lipat	1990
419	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	kursi lipat	1990
420	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	kursi lipat	1990
421	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	kursi lipat	1990
422	Piutang Angsuran	Toyota Hiace / Station (Koprasi An- Nisa)	1980
423	Piutang Angsuran	Mitsubishi / Station (drs. Abdul Fatah)	1982
424	Piutang Angsuran	Daihatsu Hilina / Pick Up (M. Baharudin, SH)	1989
425	Piutang Angsuran	Toyota Kijang / Station (Achmad Chaidir)	1995
426	Piutang Angsuran	Toyota Hiace / Station (Slamet Amirudin, Sh)	1974
427	Piutang Angsuran	VW Combie (Gito Suko Mulyono)	1980
428	Piutang Angsuran	Light Truck (Parni)	1985
429	Piutang Angsuran	Isuzu Panter / Station (Drs. Widhiharto, MPh)	1992
430	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2008
431	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	Printer	2008
432	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Toyota	2000
433	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Toyota Kijang KF 42 Std	1995
434	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Toyota / Soluna	2012
435	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Timor	2000
436	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	DAIHATSU F69 HILINE	1992

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dalam merencanakan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, sangat penting untuk melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun sebelumnya. Pengukuran yang dilakukan terhadap capaian kinerja Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun sebelumnya akan didapatkan rumusan potensi dan permasalahan yang dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk periode Renstra tahun sebelumnya dijelaskan pada Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (T-C 23) dibawah ini:



Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (T-C.23.)

No	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke- (Presentase)		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Opini Atas Laporan BPK	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	-
2	Persentase Kepatuhan OPD dalam penyusunan RKA sebagai dasar penyusunan RAPBD	-	-	-	81,20	100	100	99,73	97	100	123%	97%	100%
3	Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas	-	-	-	81,22	100	100	96,14	92	100	118%	92%	100%
4	Persentase Aset tetap dengan dokumentasi Legal	-	-	-	80,19	100	100	104,30	99,25	99,84	130%	99,25%	99,84%
5	Persentase OPD yang tertib (Laporan OPD yang tepat waktu,seusai dengan pedoman Akuntansi yang berlaku terhadap tata kelola Laporan Keuangan Daerah)	-	-	-	80,19	100	100	97,28	100	100	121%	100%	100%
6	Nilai SAKIP OPD	-	-	-	BB	BB	BB	-	BB	AA	-	100%	115,36%
7	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	-	-	100	100	100	-	-	98,44	-	-	98,44%

Berdasarkan Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember diatas menunjukkan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember telah sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan ada yang melebihi target. Pada tahun 2022, secara umum capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember masuk dalam kategori sangat memuaskan. Analisis capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Indikator Opini Atas Laporan BPK ditargetkan untuk mendapatkan opini dengan kategori WTP. Pada tahun 2022 opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember yaitu dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian opini dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa temuan BPK dalam penyusunan laporan keuangan diantaranya yaitu adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut;
 1. Belanja honorarium tidak sesuai ketentuan;
 2. Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal;
 3. Penatausahaan barang milik daerah berupa aset tetap belum sepenuhnya tertib.
- b. Indikator Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RKA sebagai dasar penyusunan RAPBD ditargetkan sebesar 81,20% dengan realisasi capaian 99,73%. Terpenuhinya target capaian kinerjanya ini didorong oleh faktor tertibnya penyusunan RAPBD sampai APBD, dari tertib waktu serta kesesuaian kode rekening disetiap Perangkat Daerah.
- c. Indikator Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas ditargetkan sebesar 82,22% dengan realisasi capaian 96,14%. Keberhasilan atas target yang telah ditetapkan ini disebabkan pencairan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK), meskipun masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum tertib dalam melakukan penyerapan anggaran sehingga berpengaruh pada capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- d. Indikator Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal ditargetkan sebesar 80,19% dengan realisasi capaian 104,30%. Realisasi capaian yang sangat tinggi ini disebabkan target sertifikasi secara multiyears bisa direalisasikan dengan baik, serta sering berkordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember. Dalam hal manajemen asset persediaan juga sudah baik dengan diterapkannya sistem aplikasi SIPERDA, serta rekonsiliasi asset Barang Milik Daerah Kabupaten Jember secara rutin.
- e. Indikator Persentase OPD yang tertib (Laporan OPD yang tepat waktu,seusai dengan pedoman Akuntansi yang berlaku terhadap tata kelola Laporan Keuangan Daerah) ditargetkan sebesar 80,19% dengan realisasi capaian 97,28%. Hal ini didorong oleh tertibnya penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi secara baik yang diiringi dengan tertibnya Perangkat Daerah dalam hal menyusun Laporan Keuangan Daerah, menindaklanjuti temuan BPK secara baik dan sesuai aturan.

Pada tahun 2023 secara umum capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember masuk dalam kategori sangat memuaskan. Dengan demikian maka secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang keuangan secara baik. Analisis capaian kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Indikator Opini Atas Laporan BPK ditargetkan untuk mendapatkan opini dengan kategori WTP. Pada tahun 2023 opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember yaitu dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian opini dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa temuan BPK dalam penyusunan laporan keuangan diantaranya yaitu adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:
 - 1. Kekurangan volume atas 12 paket pekerjaan belanja midal jalan, jaringan dan irigasi pada 3 (tiga) Perangkat Daerah;
 - 2. Penagihan dan penatausahaan piutang pajak daerah belum tertib;
 - 3. Penatausahaan persediaan belum tertib.

- b. Indikator Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RKA sebagai dasar penyusunan RAPBD ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi capaian 97%. Capaian kinerja sebesar 97% dapat dikategorikan sangat memuaskan didorong oleh faktor tertibnya penyusunan RAPBD sampai APBD. Dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2022, capaian realisasi pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan sebesar 1,27%. Penurunan capaian ini disebabkan oleh beberapa Perangkat Daerah yang masih belum taat dalam penyusunan RKA, dimana masih terdapat Perangkat Daerah yang belum sesuai dengan ketentuan penyusunan RKA yang berlaku.
- c. Indikator Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi capaian 92% atau termasuk dengan kategori sangat memuaskan. Tidak berbeda dengan indikator pertama, pada indikator persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 4,16%. Hal ini dikarenakan proses pengajuan pencairan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang telah ditetapkan, sehingga berpengaruh pada pengelolaan keuangan daerah yang tertib, akurat dan valid.
- d. Indikator Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi capaian 99,25%. Capaian dengan kategori sangat memuaskan ini tidak lepas dari langkah dalam melakukan sertifikasi aset Pemerintah Kabupaten Jember. Akan tetapi, capaian pada tahun 2023 ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan capaian realisasi salah satunya disebabkan karena adanya sebagian kecil aset yang belum tersertifikasi yaitu garis pantai Paseban yang berada di Kecamatan Kencong.
- e. Indikator Persentase OPD yang tertib (Laporan OPD yang tepat waktu, sesuai dengan pedoman Akuntansi yang berlaku terhadap tata kelola Laporan Keuangan Daerah) ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi capaian 100%. Keberhasilan atas terpenuhinya target yang ditetapkan tidak lepas dari tertibnya Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu, penyajian Laporan Keuangan Daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Akuntabel, Kecukupan Pengungkapan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

- f. Indikator Nilai Sakip OPD ditargetkan nilai BB pada tahun 2023 dengan capaian nilai sebesar 80,00 atau BB (sangat baik). Capaian tersebut merupakan penilaian dari beberapa komponen manajemen kinerja yang dievaluasi seperti; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Selain itu, berdasarkan analisis *Core Business* berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan tema utama yang diperoleh adalah Keuangan, APBD, Koordinasi dan Aset Daerah. Dalam kaitannya dengan RB tematik pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi, dengan melakukan audit dan pengawasan yang ketat, BPKAD dapat memastikan bahwa dana yang disediakan untuk mengentaskan kemiskinan benar-benar digunakan dengan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pada tahun 2024 secara umum capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember masuk dalam kategori sangat memuaskan dengan rata-rata mencapai 98,45%. Dengan demikian maka secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang keuangan secara baik. Analisis capaian kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Indikator Opini Atas Laporan BPK dengan target WTP. Indikator Opini WTP menandakan bahwa laporan keuangan entitas Kabupaten Jember yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia . Target Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember atas opini BPK dengan prosentase 90% sampai dengan 95%. Dimana pencapaian nilai prosentase tersebut diharapkan dari jumlah yang ditindaklanjuti dengan status sesuai dibagi dengan total jumlah temuan di Pemerintah Kabupaten Jember. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember TA 2023 yang diberikan oleh BPK dengan prosentase 82,34% sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember TA 2024 yang diberikan oleh BPK dengan prosentase 88%, hal ini mengalami peningkatan nilai prosentase sebesar 5,66% yang diperoleh untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.
- b. Indikator persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RKA sebagai dasar penyusunan RAPBD ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi capaian 100%. Hal ini didorong oleh kepatuhan Perangkat Daerah melakukan penyusunan RKA

dalam hal penunjang tersusunnya APBD Kabupaten Jember. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, capaian pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3%.

- c. Indikator persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi capaian 100% atau termasuk dengan kategori sangat memuaskan. Pada tahun 2024 dengan capaian yang sangat baik ini didorong oleh ketaatan Perangkat Daerah dalam melakukan penyerapan anggaran yang sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang sudah ditetapkan. Dengan ketaatan Perangkat Daerah dalam penyerapan anggaran sesuai RAK yang direncanakan, maka pengelolaan keuangan daerah bisa dilaksanakan dengan tertib, akurat dan valid.
- d. Indikator persentase aset tetap dengan dokumentasi legal ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi capaian 99,84%. Capaian indikator persentase aset tetap dengan dokumentasi legal pada tahun 2024 termasuk dengan kategori sangat baik. Meskipun demikian, dalam proses pelaksanaan kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah baik secara fisik, administratif maupun yuridis masih terdapat beberapa aset yang belum bersertifikat.
- e. Indikator Persentase OPD yang tertib (Laporan OPD yang tepat waktu, sesuai dengan pedoman Akuntansi yang berlaku terhadap tata kelola Laporan Keuangan Daerah) ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi capaian 100%. Terpenuhinya target ini tidak lepas dari peran Perangkat Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah dengan tertib, valid dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- f. Indikator Nilai Sakip OPD ditargetkan nilai BB pada tahun 2024 dengan capaian nilai sebesar 92,29 atau AA (sangat memuaskan). Penilaian tersebut berdasarkan hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja, diantaranya:

1. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen Rencana Strategis Perubahan 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Aksi dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023 dengan hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 100%.

2. Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi pengukuran kinerja mencakup penilaian pemenuhan, kualitas dan implementasi pengukuran kinerja dengan hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 87,36%.

3. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja dengan hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 100%.

4. Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Penilaian evaluasi internal meliputi pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan evaluasi internal dengan nilai evaluasi sebesar 84,32%.

- g. Persentase indikator program yang tercapai. Capaian program/kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik, sehingga masing – masing program/kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi capaian realisasinya dengan rata-rata capaian sebesar 99,96%.

Pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Pada Tabel 2.5 yang menjelaskan realisasi anggaran dari setiap program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember dari tahun 2022 – 2024 sebagai berikut



Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (T-C.24)

Uraian Program	Anggaran Pada Tahun-			Realisasi Anggaran Pada Tahun-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.195.348.967	22.680.518.317,00	64.119.629.111,00	24.752.739.156,00	19.724.207.217,00	25.813.050.852,00	88%	87%	40%	127,41%	4,28%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	526.722.262.770	575.001.492.277,00	558.528.653.880,02	518.390.943.909,00	559.097.852.947,00	539.393.576.931,00	98%	97%	97%	6,04%	4,05%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	12.526.266.800	13.160.843.999,00	8.540.942.646,00	10.476.761.575,00	9.813.904.473,00	3.718.128.908,00	84%	75%	44%	-31,82%	-64,51%

Secara keseluruhan rasio antara realisasi dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2022-2024 sudah sangat baik dengan rata-rata capaian realisasi anggaran diatas 90% tiap tahunnya dengan rincian pada tahun 2022 realisasi sebesar 97,73%, tahun 2023 realisasi sebesar 96,36% dan tahun 2024 realisasi sebesar 90,14%. Capaian realisasi anggaran yang baik ini dikarenakan tercapainya target dari semua aspek keuangan, seperti penetapan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Jember sesuai jadwal, penyerapan anggaran yang sesuai dengan tahapan dan tepat waktu, kepatuhan Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga dalam hal manajemen aset persediaan yang sudah baik serta rekonsiliasi aset Barang Milik Daerah Kabupaten Jember secara rutin.

Pada tahun 2024 terdapat capaian realisasi yang sangat rendah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 40% dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 44%. Capaian realisasi anggaran yang rendah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 40% ini disebabkan adanya anggaran Pekerja Penerima Upah (PPU) Kabupaten Jember yang melekat di anggaran APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember yang juga bertugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Persentase anggaran PPU Kabupaten Jember sebesar 83% dari anggaran keseluruhan di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sehingga realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdampak realisasinya menjadi rendah karena anggaran PPU Kabupaten Jember melekat di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang realisasinya 37,74 % sehingga akan mempengaruhi persentase realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 menjadi sangat rendah dibawah 50%. Selain itu, capaian realisasi pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah juga sangat rendah yaitu sebesar 44%. Hal ini dikarenakan adanya realisasi yang sangat rendah pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang disebabkan tidak adanya kegiatan pembinaan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2024. Tidak adanya pembinaan

terkait pengelolaan Barang Milik Daerah ini disebabkan aplikasi Elektronik Barang Milik Daerah (e-BMD) masih dalam proses migrasi data dan juga masih diperlukan pengembangan aplikasi lebih lanjut dengan pihak Universitas Indonesia (UI) sebagai pihak ketiga yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka sesuai tugas dan fungsinya tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember memiliki kelompok sasaran layanan meliputi berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember bertugas melayani Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.

b. Unit Kerja Pemerintah Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember memberikan layanan kepada 73 perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari Badan, Bagian, Dinas dan Rumah Sakit Daerah yang berjumlah 42 (empat puluh dua) dan Kecamatan yang berjumlah 31 (tiga puluh satu).

c. Pengguna Barang dan Mitra Pemanfaatan

Pengguna barang yaitu seluruh perangkat daerah se Kabupaten Jember, sedangkan mitra pemanfaatan diantaranya pemerintah pusat di daerah, pemerintah daerah lainnya, BUMD dan masyarakat serta pihak ketiga.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Identifikasi permasalahan dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis

meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

MASALAH POKOK	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum Optimalnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Peningkatan kepatuhan Perangkat Daerah dalam penyerapan kas yang sudah dianggarkan	Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang melakukan pencairan keuangan tidak sesuai anggaran kas terutama pada Semester I
	Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran	Perubahan / Pemuktahiran kodesifikasi belanja pada tahun berjalan
	Kebijakan akuntansi dan sistem prosedur akuntansi belum ditetapkan	Kebijakan akuntansi dan sistem prosedur akuntansi yang baru masih belum ditetapkan, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan masih menggunakan perarturan yang lama
Belum Optimalnya Tata Kelola Aset Daerah	Peningkatan kepatuhan OPD dalam hal penyusunan RKBMD	Penyusunan RKBMD belum sesuai dengan standar kebutuhan dan standar barang

MASALAH POKOK	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
	Memperkuat proses rekonsiliasi untuk memvalidasi data BMD di seluruh perangkat daerah	Masih terdapat barang yang belum tercatat pada KIB dan barang dengan kondisi rusak masih belum dilakukan pengajuan penghapusan/reklasifikasi
	Penguatan implementasi kebijakan pengelolaan BMD	Masih terdapat pemanfaatan aset yang tidak sesuai ketentuan
	Penguatan pengamanan BMD, baik secara fisik, administratif maupun yuridis	Masih banyak tanah aset yang belum bersertifikat

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Visi dan Misi Kabupaten Jember mencerminkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember mengandung empat kata kunci yang selanjutnya disebut sebagai pokok visi, yakni: **"Dengan Cinta"**, **"Jember Baru"**, **"Sejahtera"**, dan **"Maju"**. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan berdasarkan pokok visi sebagai berikut:

1. Pokok visi pertama: **"Dengan Cinta"**

Pokok visi yang pertama, yaitu **"dengan cinta"** mengandung makna yang mendalam karena terkait dengan semangat (*spirit*) dan kesungguhan seluruh aktor pembangunan (*Stakeholders*) dalam membangun Kabupaten Jember ke depan. Makna visi dengan cinta merupakan bentuk penurunan dari pokok visi RPJPD Kabupaten Jember, yaitu **"berakhlak"** yang merujuk pada bentuk perilaku yang baik, santun, berbudi pekerti luhur, menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Secara spesifik dari sisi pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat menekankan bahwa Kabupaten Jember menjadi daerah yang siap melayani sepenuh hati, sebagai bentuk dari cinta dan akhlak yang baik untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember. Pokok visi **"dengan cinta"** menekankan pentingnya keikhlasan dan pengabdian dalam setiap layanan dan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memajukan Kabupaten Jember. Dengan

cinta dan dedikasi yang tinggi saat menjalankan proses pembangunan diharapkan dapat membawa perubahan positif yang berkelanjutan dan merata bagi pembangunan daerah dan masyarakat di Kabupaten Jember. Implementasi tata kelola pemerintahan dan layanan kepada masyarakat dengan **penuh cinta** dan **dedikasi** yang tinggi dapat diwujudkan dengan adanya komitmen untuk membangun birokrasi yang profesional dan humanis. Dengan adanya penguatan pada regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, maka harapan Kabupaten Jember lebih maju akan dapat terwujud.

2. Pokok visi kedua: “*Jember Baru*”

Pokok visi kedua, yaitu “*Jember baru*” bermakna bahwa dengan semangat baru “*dengan cinta*” maka berbagai sumberdaya dapat didayagunakan dengan optimal. ***Jember Baru*** adalah pandangan ke depan (*vision*) mengenai perubahan nyata dalam peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan kualitas pada aspek ekonomi, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan bidang lainnya. Perwujudan “***Jember Baru***” dimaksudkan agar Kabupaten Jember senantiasa bergerak dan bertransformasi terus menerus menjadi kabupaten yang siap menghadapi segala tantangan internal maupun eksternal, siap menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi informasi, serta siap bersaing. Dengan demikian, pokok visi “***Jember baru***” ini juga mengakomodir pokok visi RPJPD Kabupaten Jember, yaitu “***berdaya saing***”. Harapan utama adanya transformasi daerah menjadi “***Jember Baru***” memiliki makna bahwa kualitas hidup masyarakat dapat meningkat dengan adanya ketersediaan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, serta infrastruktur dasar. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing.

3. Pokok visi ketiga: “*Sejahtera*”

Pokok visi ketiga, yaitu “Sejahtera” merupakan puncak (*Ultimate*) dari tujuan pembangunan masyarakat. Sejahtera mencakup berbagai aspek kehidupan yang terintegrasi dan berjalan harmonis untuk mencapai kondisi ideal bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Jember. Pokok visi sejahtera menggambarkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di Kabupaten Jember. Kesejahteraan pada aspek ekonomi meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan aktivitas sektor riil yang dinamis sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yang kondusif dapat berdampak pada daya beli yang stabil, dimana

daya beli yang stabil merupakan unsur penting pendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama (*Long Term*). Sedangkan kesejahteraan sosial mencakup kesetaraan akses dalam setiap pelayanan dasar, meliputi layanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan, kebebasan politik, seni, budaya dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta dukungan infrastruktur perumahan yang layak.

4. Pokok visi keempat: “*Maju*”

Pokok visi keempat, yaitu “*Maju*” merupakan perwujudan Kabupaten Jember yang mengalami kemajuan di segala bidang secara terus menerus. Kemajuan di segala bidang berarti bahwa daerah selalu dinamis, sehingga perkembangan di dunia dapat selalu diikuti dengan tetap memperhatikan kondisi daerah. Oleh karenanya, Kabupaten Jember mengartikulasikan kata “*Maju*” pada dua lokus utama, yaitu: **pertama**, percepatan pembangunan di tingkat pedesaan yang diorientasikan untuk pencapaian desa yang mandiri dengan berbasis potensi lokal yang berlimpah. Kemajuan desa merupakan kekuatan yang masif dan dapat menimbulkan dampak yang besar bagi kemajuan daerah. **Kedua**, ditekankan pada wilayah perkotaan (*Urban Area*) sebagai upaya membangun keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam, Orientasi pembangunan kota dilakukan berbasis *Green Policy* dengan penerapan tata kelola sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan prinsip keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam ini, Kabupaten Jember berupaya untuk tetap memperhatikan pokok visi RPJPD Kabupaten Jember, yaitu “**berkelanjutan**”. Implementasi maju pada perwujudan desa mandiri dan penataan kota berbasis *green policy* merupakan upaya untuk menjadikan setiap wilayah di Kabupaten Jember, baik desa maupun kota sebagai wilayah yang maju melalui proses pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, sehingga dapat lebih mudah diimplementasikan dan diinternalisasi oleh publik. Makna yang terkandung dalam visi dijabarkan berdasarkan Pokok Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2025-2029 pada gambar sebagai berikut.

Gambar 2.1

Pokok Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029



Sumber : RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

Sedangkan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember dirumuskan sebagai bentuk langkah-langkah atau upaya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Jember. Terdapat 5 (lima) Misi yang dirumuskan untuk mendukung pembangunan jangka menengah di Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Gambar 2.2

Misi Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Jember Tahun 2025-2029



Sumber : RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

2.2.1.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan

Berikut merupakan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember:

Tabel 2.8

Tabel Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kabupaten Jember

NO	MISI	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Misi ke-3 “Membangun Birokrasi yang Profesional, Humanis dan Melayani serta Penerapan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik.”	Terintegrasinya sistem seperti SIPD RI, SIPD Penatausahaan dan SIPD Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) dari pusat sampai daerah sehingga membantu tata kelola keuangan daerah yang lebih baik	Belum optimalnya sistem karena sistem digunakan oleh semua daerah di seluruh Indonesia
		Koordinasi terpusat antar Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan/penganggaran yang baik	Kurangnya komunikasi antar Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen pendukung
		Adanya Rencana Anggaran Kas (RAK) masing-masing Perangkat Daerah untuk melaksanakan APBD yang optimal dan tepat waktu	Kurangnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Rencana Anggaran Kas (RAK) yang dibuat
		Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perbendaharaan	Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perbendaharaan belum benar-benar dipahami oleh bendahara pengeluaran dan penerimaan



NO	MISI	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		Aplikasi SIPD Penatausahaan sebagai sistem penunjang pengelolaan keuangan daerah	Kurangnya respon dari Pusdatin Kemendagri terkait permasalahan yang ada di Kabupaten Jember
		Berdasarkan hasil rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan diperoleh angka realisasi yang tepat dan akurat	Pada saat jadwal rekonsiliasi, akses masuk SIPD Aklap masih sulit dan membutuhkan beberapa kali percobaan
		Terintegrasinya aplikasi Elektronik Barang Milik Daerah (e-BMD) dengan SIPD Akuntansi dan Pelaporan (SIPD Aklap) dengan menyajikan data rekonsiliasi aset tetap dan aset lancar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan	Aplikasi e-BMD masih belum dapat menyajikan rincian barang serta laporan konsolidasi

2.2.1.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Renstra K/L dilakukan dengan menyandingkan dengan sasaran Renstra Kementerian Keuangan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Timur. Penelaahan Renstra Kementerian Keuangan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, namun tidak ada implikasi terhadap kebutuhan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

Adapun telaah yang dilakukan terhadap Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Timur dengan menyandingkan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Timur dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Sehingga dapat diidentifikasi factor pendorong dan factor penghambat yang mempengaruhi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya dijadikan bahan penyusunan isu strategis.

2.2.1.3 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Republik Indonesia diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang sehat, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Arah kebijakan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pengelola keuangan daerah. Kementerian Keuangan menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara efektif. Selain itu, reformasi pengelolaan keuangan dilakukan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, peningkatan disiplin penganggaran, serta penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan *value for money* dalam setiap belanja daerah. Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga mendorong peningkatan efisiensi pengelolaan kas daerah melalui penguatan manajemen kas, perencanaan arus kas yang lebih baik, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Upaya ini bertujuan agar likuiditas daerah terjaga dan penggunaan APBD dapat lebih optimal. Selanjutnya, kebijakan Kementerian Keuangan menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini menjadi dasar bagi BPKAD/BPKPD untuk memperkuat akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan APBD, serta mendorong pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, telaahan terhadap Renstra Kementerian Keuangan memberikan arahan bagi BPKAD/BPKPD untuk memfokuskan strategi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah, penguatan tata kelola APBD, optimalisasi manajemen kas, serta transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional.

Tabel 2.9

Tabel Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Perubahan/ Pemuktahiran kodesifikasi belanja pada tahun berjalan	Koordinasi terpusat antar Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan/penganggaran yang baik	Kurangnya komunikasi antar Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen pendukung
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Lebih Efektif, Efisien dan Memberi Manfaat Finansial	Masih terdapat barang yang belum tercatat pada KIB dan barang dengan kondisi rusak masih belum dilakukan pengajuan penghapusan/reklasifikasi	Adanya pengurus barang di setiap Perangkat Daerah yang mendukung pencatatan BMD	Penatausahaan BMD masih dilakukan secara manual, karena aplikasi e-BMD masih dalam tahap pengembangan dan migrasi data

2.2.1.4 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur

Telaahan terhadap Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dilakukan untuk memahami arah kebijakan, strategi, serta program prioritas yang akan dijalankan dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan daerah. Telaahan ini juga dimaksudkan untuk memastikan adanya keselarasan antara arah kebijakan nasional, provinsi, serta kebutuhan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Renstra BPKAD Provinsi Jawa Timur menekankan pada penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan, dengan tujuan menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus meningkatkan kemandirian daerah. Selain itu, BPKAD Jawa Timur juga menitikberatkan pada efisiensi pengelolaan kas daerah melalui manajemen kas yang terintegrasi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan dan pengendalian keuangan secara real time.

Dalam aspek pengelolaan aset daerah, arah kebijakan BPKAD Provinsi Jawa Timur menekankan pada penataan, inventarisasi, dan legalisasi barang milik daerah

(BMD). Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset sekaligus mendorong pemanfaatannya secara produktif sebagai sumber pendapatan daerah. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong optimalisasi aset negara dan daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi. Selain itu, Renstra BPKAD Jawa Timur juga memperhatikan pentingnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset.

Tabel 2.10

Tabel Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi Jawa Timur

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan Kualitas Penyusunan Kebijakan Teknis Di Bidang Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan terhadap regulasi, kebijakan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah	Adanya regulasi, kebijakan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dapat dipedomani	Pemahaman terhadap regulasi, kebijakan yang terus berkembang
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jatim	Masih kurangnya analisis kebutuhan BMD, penatausahaan serta pelaporan BMD	Efisiensi dalam pengelolaan serta penggunaan BMD	Kurang tertibnya administrasi dalam pengelolaan BMD

2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015-2035. Tujuan Penataan Ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan keuangan memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Ditinjau Dari Implikasi RTRW

No	Telaah RTRW Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Perwujudan RTRW dan kinerja pembangunan daerah dilakukan optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset-aset pemerintah dan daerah, serta pencadangan lahan pada lokasi strategis.	1. Adanya peraturan perundang undangan terkait sistem pengelolaan keuangan dan asset yang dapat dipedomani 2. Tersedianya sarana sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah 3. Kolaborasi dan sinergitas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Jember 4. Adanya pembinaan , pendampingan dan pengendalian kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember terkait dengan penganggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban APBD 5. Fungsi strategis dalam rangka fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset daerah baik dari sisi penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan	1. Masih adanya aparatur yang kurang memahami peraturan perundang – undangan,utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset 2. Belum optimalnya sistem pengeloaan keuangan dan aset daerah

2.2.1.6 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12

**Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah Ditinjau Dari Implikasi KLHS**

No	Telaah KLHS Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	- Efisiensi dalam pengelolaan keuangan - Akuntabilitas pemerintah - Indeks Reformasi Birokrasi	Penyusunan Anggaran yang kurang tepat yang dapat mempengaruhi anggaran menjadi tidak efektif dan akurat sehingga berdampak pada proporsi pengeluaran
2	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Peningkatan PAD(Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)	- Ketidakpatuhan dalam pengumpulan pajak - Belanja yang tidak efisien yang dapat mengurangi pendapatan pemerintah
3	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Peningkatan penerimaan pajak domestik	Pertumbuhan ekonomi yang lambat berdampak pada pendapatan pajak

2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Sasaran strategis pada Renstra K/L, Perangkat Daerah Provinsi, RTRW dan KLHS, serta dilakukan perumpunan terhadap permasalahan Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah:



Tabel 2.13

**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Jember**

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kebijakan akuntansi dan sistem prosedur akuntansi belum ditetapkan	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.				Peningkatan akuntabilitas laporan keuangan daerah
Penyerapan anggaran sesuai RAK yang sudah ditetapkan	Kurangnya kepatuhan PD terhadap RAK yang sudah dibuat	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.				Peningkatan kepatuhan dalam penyerapan anggaran kas
Penyusunan APBD dan PAPBD	Perubahan / Pemuktahiran kodesifikasi belanja pada tahun berjalan	-				Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pembangunan daerah
Pengelolaan Aset Daerah	Penguatan implementasi kebijakan pengelolaan BMD	-				Pemanfaatan asset daerah sesuai ketentuan
	Penguatan pengamanan BMD, baik secara fisik, administratif maupun yuridis	-				Pengamanan aset daerah dari potensi kerugian atau kehilangan
	Penyusunan RKBMD belum sesuai dengan standar kebutuhan dan standar barang	-				Peningkatan kepatuhan OPD dalam hal



Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
						penyusunan RKBMD
	Masih terdapat barang yang belum tercatat pada KIB dan barang dengan kondisi rusak masih belum dilakukan pengajuan penghapusan/reklasifikasi	-				Memperkuat proses rekonsiliasi untuk memvalidasi data BMD di seluruh perangkat daerah

BAB III**TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember**

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi Bupati Kabupaten Jember yaitu:

"Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju"

Dengan Misi yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah termasuk dalam Misi ke-3 yaitu:

"Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"

Perumusan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada sasaran sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Adaptif"

Dengan Indikator Tujuan:

"Opini BPK atas Laporan Keuangan"

Dari Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember tersebut kemudian dirumuskan menjadi Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah"

Berikut adalah Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.1

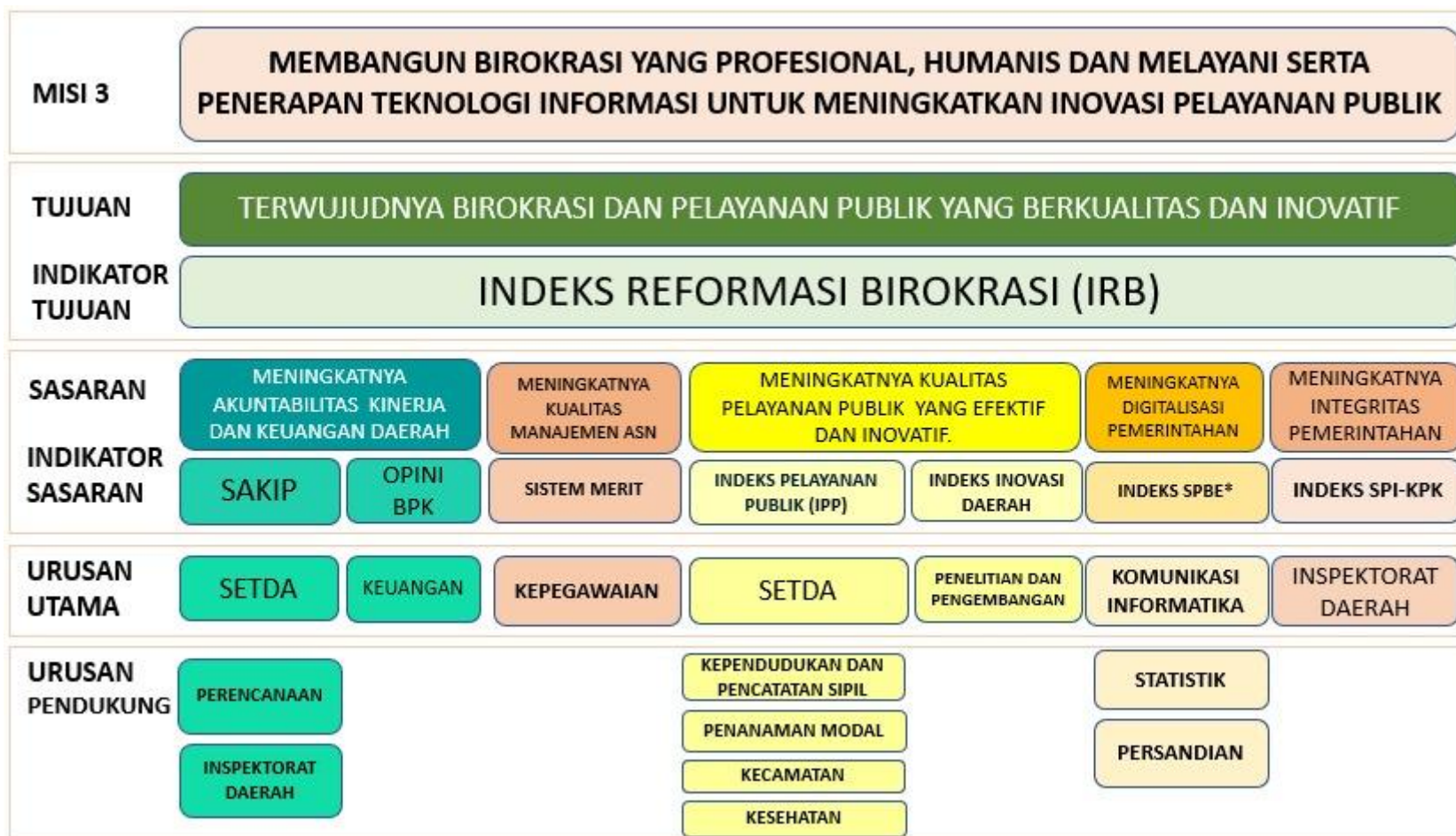
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Adaptif		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penyerapan APBD (%)	87,57	88	88,5	89	89,5	100	100
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	88	90	90,1	90,2	90,3	90,4	90,5
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,06	82	83	84	85	86	87



Gambar 3.1

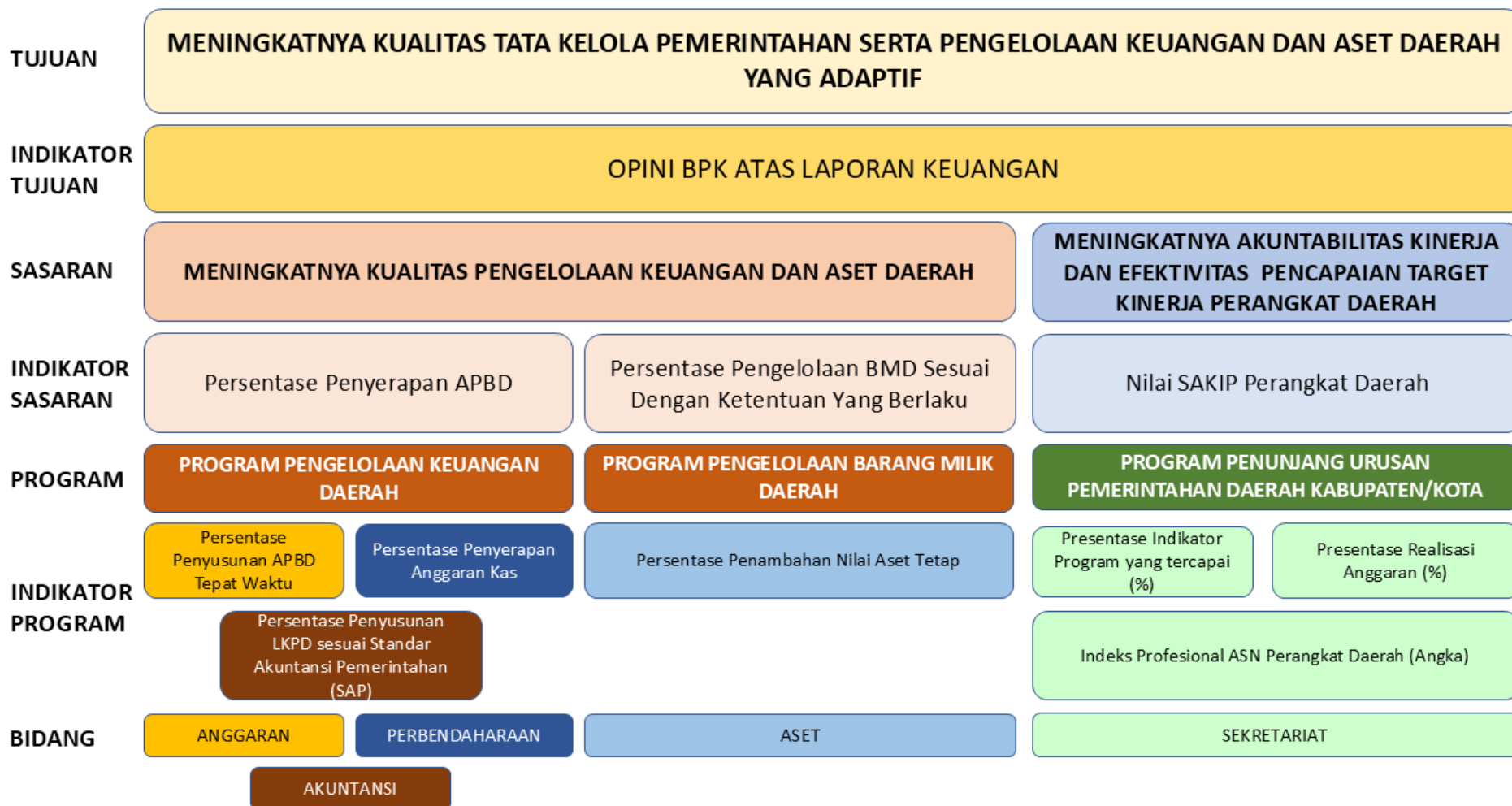
Cascading Misi 3 RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029





Gambar 3.2

Cascading Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (T-C. 26.)

Visi	Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju		
Misi	Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Serta Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Adaptif	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Peningkatan kepatuhan dalam penyerapan kas yang sudah dianggarkan
			Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran
			Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam implementasi SIPD Penatausahaan
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah	Peningkatan kepatuhan PD dalam hal penyusunan RKBMD yang tepat waktu
			Memperkuat proses rekonsiliasi untuk memvalidasi data BMD di seluruh perangkat daerah
			Penguatan implementasi kebijakan pengelolaan BMD
			Penguatan pengamanan BMD, baik secara fisik, administratif maupun yuridis

BAB IV**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN****4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja Indikator, Target dan Pagu
Indikatif**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran, sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.



Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Adaptif				Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Persentase Penyerapan APBD (%)		
					Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku		
			Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah		Persentase Penyusunan APBD Tepat Waktu (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Persentase Capaian Penatausahaan Keuangan Daerah (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Persentase Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya kepatuhan PD terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan APBD	Persentase PD yang Patuh Dalam Penyusunan APBD	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
				Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
				Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
				Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
				Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
				Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
				Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
				Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
				Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	5.02.02.2.01.0012 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD mengelola Perbendaharaan sesuai aturan yang berlaku	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
				Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
				Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)		
				Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
				Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
				Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
				Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku	Persentase pengelolaan anggaran pemerintah sesuai aturan yang berlaku	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
				Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
				Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu rekonsiliasi OPD	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
				Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
				Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
				Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Presentase Realisasi Anggaran (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, partisipatif, dan tepat waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya dokumen pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya dokumen ketatausahaan dan kepegawaian sesuai kebutuhan perangkat daerah.	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa secara periodik dan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember guna mencapai sasaran tertentu. Dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember melakukan 2 (dua) program utama dan 1 (satu) Program Penunjang sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berikut ini adalah Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember:



Tabel 4.2

Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02 - KEUANGAN						726.999.551.068,55		701.197.669.432,12		733.452.762.226,52		766.458.136.526,57		800.948.752.670,32	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				46.623.522.403,60		102.642.878.058,65		55.603.411.595,91		58.161.168.529,32		60.778.421.113,15		63.513.450.063,22	
Meningkatnya Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100	46.623.522.403,60	100	102.642.878.058,65	100	55.603.411.595,91	100	58.161.168.529,32	100	60.778.421.113,15	100	63.513.450.063,22	
	Presentase Realisasi Anggaran (%)	90,14	91		92		93		94		95		96		
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	79,8	80,3		80,8		81,3		81,8		82,3		82,8		
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				176.200.500		459.343.900		190.068.406,03		198.811.552,71		207.758.072,58		217.107.185,84	
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, partisipatif, dan tepat waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	8	176.200.500	7	459.343.900	7	190.068.406,03	7	198.811.552,71	7	207.758.072,58	8	217.107.185,84	
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				56.535.200		113.098.400		65.181.654,14		68.180.010,23		71.248.110,69		74.454.275,67	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	56.535.200	2	113.098.400	2	65.181.654,14	2	68.180.010,23	2	71.248.110,69	3	74.454.275,67	
5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				19.279.400		61.802.500		20.686.256,38		21.637.824,17		22.611.526,26		23.629.044,93	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	19.279.400	1	61.802.500	1	20.686.256,38	1	21.637.824,17	1	22.611.526,26	1	23.629.044,93	
5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				19.389.000		23.701.000		20.803.854,11		21.760.831,40		22.740.068,81		23.763.371,91	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	19.389.000	1	23.701.000	1	20.803.854,11	1	21.760.831,40	1	22.740.068,81	1	23.763.371,91	
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				24.455.600		49.612.000		26.240.174,04		27.447.222,05		28.682.347,04		29.973.052,66	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	24.455.600	1	49.612.000	1	26.240.174,04	1	27.447.222,05	1	28.682.347,04	1	29.973.052,66	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				20.672.300		72.007.000		22.180.799,08		23.201.115,83		24.245.166,05		25.336.198,52	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	20.672.300	1	72.007.000	1	22.180.799,08	1	23.201.115,83	1	24.245.166,05	1	25.336.198,52	
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				35.869.000		139.123.000		34.975.668,28		36.584.549,03		38.230.853,73		39.951.242,15	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	35.869.000	1	139.123.000	1	34.975.668,28	1	36.584.549,03	1	38.230.853,73	1	39.951.242,15	
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				43.323.295.153,60		98.427.656.058,65		51.165.767.377,68		53.519.392.677,06		55.927.765.347,52		58.444.514.788,16	
Tersedianya dokumen pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan pertanggungjawabana keuangan	228	228	43.323.295.153,60	228	98.427.656.058,65	228	51.165.767.377,68	228	53.519.392.677,06	228	55.927.765.347,52	228	58.444.514.788,16	
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				42.538.338.613,60		96.968.109.158,65		50.430.865.743,07		52.750.685.567,25		55.124.466.417,77		57.605.067.406,57	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70	70	42.538.338.613,60	63	96.968.109.158,65	63	50.430.865.743,07	63	52.750.685.567,25	63	55.124.466.417,77	63	57.605.067.406,57	
5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				708.317.200		1.350.962.100		652.669.768,70		682.692.578,06		713.413.744,07		745.517.362,55	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	708.317.200	48	1.350.962.100	48	652.669.768,70	48	682.692.578,06	48	713.413.744,07	48	745.517.362,55	
5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				45.665.980		53.560.300		48.998.317,89		51.252.240,52		53.558.591,34		55.968.727,95	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	100	45.665.980	48	53.560.300	48	48.998.317,89	48	51.252.240,52	48	53.558.591,34	48	55.968.727,95	
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				16.013.420		29.099.700		17.181.951,28		17.972.321,04		18.781.075,49		19.626.223,89	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	16.013.420	1	29.099.700	1	17.181.951,28	1	17.972.321,04	1	18.781.075,49	1	19.626.223,89	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				14.959.940		25.924.800		16.051.596,74		16.789.970,19		17.545.518,85		18.335.067,20	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	14.959.940	48	25.924.800	48	16.051.596,74	48	16.789.970,19	48	17.545.518,85	48	18.335.067,20	
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				289.000.000		373.400.000		193.134.960		202.019.168,16		211.110.030,73		220.609.982,11	
Tersusunnya dokumen ketatausahaan dan kepegawaian sesuai kebutuhan perangkat daerah.	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	4	4	289.000.000	4	373.400.000	4	193.134.960	4	202.019.168,16	3	211.110.030,73	4	220.609.982,11	
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				289.000.000		373.400.000		193.134.960		202.019.168,16		211.110.030,73		220.609.982,11	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	289.000.000	1	373.400.000	1	193.134.960	1	202.019.168,16	1	211.110.030,73	1	220.609.982,11	
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				667.124.600		843.792.400		832.678.740,32		870.981.962,38		910.176.150,69		951.134.077,46	
Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa secara periodik dan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12	12	667.124.600	12	843.792.400	12	832.678.740,32	12	870.981.962,38	12	910.176.150,69	12	951.134.077,46	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.550.000		10.694.900		2.188.862,88		2.289.550,57		2.392.580,35		2.500.246,46	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.550.000	1	10.694.900	1	2.188.862,88	1	2.289.550,57	1	2.392.580,35	1	2.500.246,46	
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		183.634.500		458.657.332,20		479.755.569,48		501.344.570,10		523.905.075,76	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0	1	183.634.500	1	458.657.332,20	1	479.755.569,48	1	501.344.570,10	12	523.905.075,76	
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				273.580.200		300.000.000		132.334.035,95		138.421.401,60		144.650.364,67		151.159.631,08	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	273.580.200	1	300.000.000	1	132.334.035,95	1	138.421.401,60	1	144.650.364,67	1	151.159.631,08	
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				58.418.400		79.220.000		62.649.118,32		65.530.977,77		68.479.871,77		71.561.466	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	58.418.400	1	79.220.000	1	62.649.118,32	1	65.530.977,77	1	68.479.871,77	1	71.561.466	
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				329.576.000		270.243.000		176.849.390,97		184.984.462,96		193.308.763,80		202.007.658,16	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	329.576.000	12	270.243.000	12	176.849.390,97	12	184.984.462,96	12	193.308.763,80	12	202.007.658,16	
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.804.002.150		1.915.343.200		2.822.992.068,08		2.952.849.703,20		3.085.727.939,85		3.224.585.697,15	
Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	1.804.002.150	12	1.915.343.200	12	2.822.992.068,08	12	2.952.849.703,20	12	3.085.727.939,85	12	3.224.585.697,15	
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.450.000		12.468.000		2.596.592,24		2.716.035,48		2.838.257,08		2.965.978,65	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	8.450.000	12	12.468.000	12	2.596.592,24	12	2.716.035,48	12	2.838.257,08	12	2.965.978,65	
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				127.150.000		130.500.000		135.355.417,80		141.581.767,02		147.952.946,53		154.610.829,13	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	127.150.000	12	130.500.000	12	135.355.417,80	12	141.581.767,02	12	147.952.946,53	12	154.610.829,13	
5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		951.123.368,33		994.875.043,27		1.039.644.420,22		1.086.428.419,13	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0	0	0	0	1	951.123.368,33	1	994.875.043,27	1	1.039.644.420,22	1	1.086.428.419,13	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.668.402.150		1.772.375.200		1.733.916.689,71		1.813.676.857,43		1.895.292.316,02		1.980.580.470,24	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.668.402.150	12	1.772.375.200	12	1.733.916.689,71	12	1.813.676.857,43	12	1.895.292.316,02	12	1.980.580.470,24	
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				363.900.000		623.342.500		398.770.043,80		417.113.465,81		435.883.571,78		455.498.332,50	
Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	363.900.000	1	623.342.500	1	398.770.043,80	1	417.113.465,81	1	435.883.571,78	1	455.498.332,50	
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				52.000.000		70.986.500		55.794.544		58.361.093,02		60.987.342,21		63.731.772,61	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	52.000.000	1	70.986.500	1	55.794.544	1	58.361.093,02	1	60.987.342,21	1	63.731.772,61	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				311.900.000		541.200.000		332.245.779,80		347.529.085,67		363.167.894,53		379.510.449,78	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	26	311.900.000	26	541.200.000	26	332.245.779,80	26	347.529.085,67	26	363.167.894,53	26	379.510.449,78	
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		11.156.000		10.729.720		11.223.287,12		11.728.335,04		12.256.110,11	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	1	11.156.000	1	10.729.720	1	11.223.287,12	1	11.728.335,04	1	12.256.110,11	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				565.067.164.192,00		617.905.400.854,90		640.694.992.206		670.166.961.848		700.324.475.131		731.839.076.512	
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan APBD Tepat Waktu (%)	100	100	565.067.164.192,00	100	617.905.400.854,90	100	640.694.992.206	100	670.166.961.848	100	700.324.475.131	100	731.839.076.512	
	Persentase Penyerapan Anggaran Kas (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Penyusunan LKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)%	100	100		100		100		100		100		100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.514.269.500		1.847.385.000		1.615.448.939,15		1.689.759.590,36		1.765.798.771,83		1.845.259.716,65	
Meningkatnya kepatuhan PD terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan APBD	Persentase PD yang patuh dalam penyusunan APBD	100	100	1.514.269.500	100	1.847.385.000	100	1.615.448.939,15	100	1.689.759.590,36	100	1.765.798.771,83	100	1.845.259.716,65	
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				58.894.000		77.594.000		63.191.612,97		66.098.427,16		69.072.856,39		72.181.134,92	
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	1	1	58.894.000	2	77.594.000	2	63.191.612,97	2	66.098.427,16	2	69.072.856,39	2	72.181.134,92	
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				58.894.000		77.594.000		63.191.612,97		66.098.427,16		69.072.856,30		72.181.134,92	
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	1	1	58.894.000	2	77.594.000	2	63.191.612,97	2	66.098.427,16	2	69.072.856,30	2	72.181.134,92	
5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				207.900.000		200.700.000		199.894.683,60		209.089.839,05		218.498.881,80		228.331.331,48	
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	72	72	207.900.000	66	200.700.000	66	199.894.683,60	66	209.089.839,05	66	218.498.881,80	66	228.331.331,48	
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				194.100.000		200.700.000		185.087.670		193.601.702,82		202.313.779,45		211.417.899,52	
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	72	72	194.100.000	66	200.700.000	66	185.087.670	66	193.601.702,82	66	202.313.779,45	66	211.417.899,52	
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi,				207.900.000		200.700.000		199.894.683,60		209.089.839,05		218.498.881,80		228.331.331,48	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD															
Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	72	72	207.900.000	66	200.700.000	66	199.894.683,60	66	209.089.839,05	66	218.498.881,80	66	228.331.331,48	
5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				207.900.000		200.700.000		199.894.683,60		209.089.839,05		218.498.881,80		228.331.331,48	
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	72	72	207.900.000	66	200.700.000	66	199.894.683,60	66	209.089.839,05	66	218.498.881,80	66	228.331.331,48	
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				180.381.000		248.024.000		193.543.762,33		202.446.775,40		211.556.880,29		221.076.939,91	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2	180.381.000	2	248.024.000	2	193.543.762,33	2	202.446.775,40	2	211.556.880,29	2	221.076.939,91	
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				200.483.000		227.614.000		193.543.762,33		202.446.775,40		211.556.880,29		221.076.939,91	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	2	200.483.000	2	227.614.000	2	193.543.762,33	2	202.446.775,40	2	211.556.880,29	2	221.076.939,91	
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				20.473.500		116.724.000		43.504.186,23		45.505.378,79		47.553.120,84		49.693.011,28	
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	4	4	20.473.500	2	116.724.000	2	43.504.186,23	2	45.505.378,79	2	47.553.120,84	2	49.693.011,28	
5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				0		0		48.988.682,60		51.242.162		53.548.059,29		55.957.721,96	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	1	0	0	0	0	1	48.988.682,60	1	51.242.162	1	53.548.059,29	1	55.957.721,96	
5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				45.657.000		93.545.000		48.988.682,60		51.242.162		53.548.059,29		55.957.721,96	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	1	1	45.657.000	1	93.545.000	1	48.988.682,60	1	51.242.162	1	53.548.059,29	1	55.957.721,96	
5.02.02.2.01.0012 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				0		0		48.988.682,60		51.242.162		53.548.059,29		55.957.721,96	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	1	0	0	0	0	1	48.988.682,60	1	51.242.162	1	53.548.059,29	1	55.957.721,96	
5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				131.687.000		203.490.000		126.736.233,72		132.566.100,48		138.531.575		144.765.495,87	
Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	72	72	131.687.000	66	203.490.000	66	126.736.233,72	66	132.566.100,48	66	138.531.575	66	144.765.495,87	
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				605.587.200		1.445.203.700		660.079.927,93		690.443.604,60		721.513.566,82		753.981.677,32	
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD mengelola Perbendaharaan sesuai aturan yang berlaku	100	100	605.587.200	100	1.445.203.700	100	660.079.927,93	100	690.443.604,60	100	721.513.566,82	100	753.981.677,32	
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				0		0		5.364.860		5.611.643,56		5.864.167,52		6.128.055,06	
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	0	0	0	0	0	12	5.364.860	12	5.611.643,56	12	5.864.167,52	12	6.128.055,06	
5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				0		0		5.364.860		5.611.643,56		5.864.167,52		6.128.055,06	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	272	5.364.860	272	5.611.643,56	272	5.864.167,52	272	6.128.055,06	
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				109.605.400		300.534.800		118.408.254,25		123.855.033,94		129.428.510,47		135.252.793,44	
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	27.066	27.066	109.605.400	60	300.534.800	60	118.408.254,25	60	123.855.033,94	60	129.428.510,47	60	135.252.793,44	
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				95.679.400		316.006.600		94.684.843,33		99.040.346,12		103.497.161,70		108.154.533,97	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	2	2	95.679.400	9	316.006.600	9	94.684.843,33	9	99.040.346,12	9	103.497.161,70	9	108.154.533,97	
5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				353.382.800		450.102.800		371.201.959,61		388.277.249,75		405.749.725,99		424.008.463,66	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	27.066	27.066	353.382.800	12	450.102.800	12	371.201.959,61	12	388.277.249,75	12	405.749.725,99	12	424.008.463,66	
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				46.919.600		378.559.500		65.055.150,74		68.047.687,67		71.109.833,62		74.309.776,13	
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	72	72	46.919.600	230	378.559.500	230	65.055.150,74	230	68.047.687,67	230	71.109.833,62	230	74.309.776,13	
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				520.413.800		1.410.552.600		616.050.360,43		644.388.677,53		673.386.167,95		703.688.545,53	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100	100	520.413.800	100	1.410.552.600	100	616.050.360,43	100	644.388.677,53	100	673.386.167,95	100	703.688.545,53	
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				68.822.800		135.127.100		35.860.655,59		37.510.245,75		39.198.206,81		40.962.126,11	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	260	260	68.822.800	1.632	135.127.100	1.632	35.860.655,59	1.632	37.510.245,75	1.632	39.198.206,81	1.632	40.962.126,11	
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				268.851.500		483.874.000		292.312.980,88		305.759.378		319.518.550,01		333.896.884,76	
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	3	3	268.851.500	3	483.874.000	3	292.312.980,88	3	305.759.378	3	319.518.550,01	3	333.896.884,76	
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				106.576.100		122.125.100		114.893.949,06		120.179.070,71		125.587.128,90		131.238.549,70	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	106.576.100	4	122.125.100	4	114.893.949,06	4	120.179.070,71	4	125.587.128,90	4	131.238.549,70	
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				76.163.400		640.067.100		115.321.850,29		120.626.655,40		126.054.854,90		131.727.323,37	
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	72	72	76.163.400	66	640.067.100	66	115.321.850,29	66	120.626.655,40	66	126.054.854,90	66	131.727.323,37	
5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				0		29.359.300		57.660.924,61		60.313.327,67		63.027.427,33		65.863.661,59	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	0	0	0	53	29.359.300	53	57.660.924,61	53	60.313.327,67	53	63.027.427,33	53	65.863.661,59	
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				562.426.893.692		613.202.259.554,90		637.803.412.978,49		667.142.369.975,51		697.163.776.624,40		728.536.146.572,50	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku	Persentase Realisasi Dana Transfer	100	100	562.426.893.692	100	613.202.259.554,90	100	637.803.412.978,49	100	667.142.369.975,51	100	697.163.776.624,40	100	728.536.146.572,50	
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				519.434.945.200		515.010.850.883		570.214.816.021,13		596.444.697.558,11		623.284.708.948,22		651.332.520.850,89	
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	226	226	519.434.945.200	1	515.010.850.883	1	570.214.816.021,13	1	596.444.697.558,11	1	623.284.708.948,22	1	651.332.520.850,89	
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				20.000.000.000		40.000.000.000		42.918.880.000		44.893.148.480		46.913.340.161,60		49.024.440.468,87	
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	1	20.000.000.000	1	40.000.000.000	1	42.918.880.000	1	44.893.148.480	1	46.913.340.161,60	1	49.024.440.468,87	
5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				22.991.948.492		58.191.408.671,90		24.669.716.957,36		25.804.523.937,40		26.965.727.514,58		28.179.185.252,74	
Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	226	226	22.991.948.492	1	58.191.408.671,90	1	24.669.716.957,36	1	25.804.523.937,40	1	26.965.727.514,58	1	28.179.185.252,74	
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				5.505.489.148		6.451.272.155		4.899.265.630,21		5.124.631.849,20		5.355.240.282,42		5.596.226.095,10	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	2,03	2,05	5.505.489.148	2,07	6.451.272.155	2,09	4.899.265.630,21	3,01	5.124.631.849,20	3,03	5.355.240.282,42	3,05	5.596.226.095,10	
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				5.505.489.148		6.451.272.155		4.899.265.630,21		5.124.631.849,20		5.355.240.282,42		5.596.226.095,10	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu rekonsiliasi OPD	100	100	5.505.489.148	100	6.451.272.155	100	4.899.265.630,21	100	5.124.631.849,20	100	5.355.240.282,42	100	5.596.226.095,10	
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				3.090.800		447.266.000		3.316.341,86		3.468.893,58		3.624.993,79		3.788.118,51	
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	4	4	3.090.800	4	447.266.000	4	3.316.341,86	4	3.468.893,58	4	3.624.993,79	4	3.788.118,51	
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				8.932.700		8.790.700		9.584.536,98		10.025.425,69		10.476.569,84		10.948.015,48	
Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	72	72	8.932.700	66	8.790.700	66	9.584.536,98	66	10.025.425,69	66	10.476.569,84	66	10.948.015,48	
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				744.708.500		33.868.300		10.264.586,64		10.736.757,62		11.219.911,72		11.724.807,74	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	72	72	744.708.500	66	33.868.300	66	10.264.586,64	66	10.736.757,62	66	11.219.911,72	66	11.724.807,74	
5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				26.843.600		26.744.600		28.802.431,18		30.127.343,01		31.483.073,45		32.899.811,75	
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	4	4	26.843.600	1	26.744.600	1	28.802.431,18	1	30.127.343,01	1	31.483.073,45	1	32.899.811,75	
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				105.679.500		104.745.400		6.093.944,47		6.374.265,92		6.661.107,89		6.960.857,74	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	72	72	105.679.500	66	104.745.400	66	6.093.944,47	66	6.374.265,92	66	6.661.107,89	66	6.960.857,74	
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				147.820.000		16.926.400		158.606.721,04		165.902.630,21		173.368.248,57		181.169.819,75	
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1.300	1.300	147.820.000	1	16.926.400	1	158.606.721,04	1	165.902.630,21	1	173.368.248,57	1	181.169.819,75	
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				2.185.320.700		2.956.514.600		2.452.380.189,42		2.565.189.678,13		2.680.623.213,65		2.801.251.258,26	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1.300	1.300	2.185.320.700	1	2.956.514.600	1	2.452.380.189,42	1	2.565.189.678,13	1	2.680.623.213,65	1	2.801.251.258,26	
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				502.258.700		702.160.400		538.909.521,86		563.699.359,86		589.065.831,06		615.573.793,45	
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	502.258.700	2	702.160.400	2	538.909.521,86	2	563.699.359,86	2	589.065.831,06	2	615.573.793,45	
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				3.656.200		3.582.700		3.923.000,23		4.103.458,24		4.288.113,86		4.481.078,98	
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	72	72	3.656.200	1	3.582.700	1	3.923.000,23	1	4.103.458,24	1	4.288.113,86	1	4.481.078,98	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				824.512.048		1.225.320.755		752.280.245,57		786.885.136,87		822.294.968,03		859.298.241,59	
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	65	65	824.512.048	3	1.225.320.755	3	752.280.245,57	3	786.885.136,87	3	822.294.968,03	3	859.298.241,59	
5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				134.465.700		134.285.000		144.277.931,06		150.914.715,89		157.705.878,10		164.802.642,62	
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	72	72	134.465.700	66	134.285.000	66	144.277.931,06	66	150.914.715,89	66	157.705.878,10	66	164.802.642,62	
5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				813.077.900		786.071.800		785.329.558,94		821.454.718,65		858.420.180,99		897.049.089,14	
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	72	72	813.077.900	66	786.071.800	66	785.329.558,94	66	821.454.718,65	66	858.420.180,99	66	897.049.089,14	
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				5.122.800		4.995.500		5.496.620,96		5.749.465,53		6.008.191,47		6.278.560,09	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	2	2	5.122.800	300	4.995.500	300	5.496.620,96	300	5.749.465,53	300	6.008.191,47	300	6.278.560,09	



4.3 Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan merupakan program terpilih yang secara teknokratik yang menjadi fokus pembangunan. Penerapan program prioritas diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan lebih efektif dan efisien. Daftar sub kegiatan yang menjadi pendukung dalam program prioritas pembangunan daerah diuraikan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	
			Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Penyusunan Standar Harga	
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	
			Penilaian Barang Milik Daerah	
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sangat penting untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase Penyerapan APBD	%	87,57	88	88,5	89	89,5	90	90,5
3.	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	%	88	90	90,1	90,2	90,3	90,4	90,5

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	positif	%	2,03	2,05	2,07	2,09	3,01	3,03	3,05	
2.	Persentase Penurunan SILPA	negatif	%	103	78	76	74	72	70	68	

Penjelasan terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK):

1. Penambahan nilai aset tetap

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah. Pada indikator kinerja ini dapat diukur dengan adanya penambahan nilai aset tetap terhadap jumlah keseluruhan atau total nilai aset tetap.

2. Penurunan SILPA

Penurunan SILPA adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien dengan cara menurunkan jumlah sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun sebelumnya. Indikator ini menunjukkan sejauh mana perencanaan dan pelaksanaan APBD dilakukan secara realistis, tepat waktu, serta tepat sasaran sehingga dana yang telah dialokasikan dapat terserap optimal untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, bukan tertahan sebagai sisa anggaran. Dengan demikian, penurunan SILPA mencerminkan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kredibilitas perencanaan, serta efektivitas belanja daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

BAB V**PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Jember



JUPRIONO, S.T., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730302 199901 1 001